



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang Kode Pos : 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : disperkimta@singkawangkota.go.id

Website : disperkimta.disperkimta@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang menggambarkan rencana target capaian kinerja, pagu dana Indikatif, dan prakiraan maju serta sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Renja merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Perangkat Daerah, dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun anggaran 2023 serta harus bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu pula Renja juga mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun 2022 dan tahun 2023).

Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke 1 (satu) dari periode Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026. Dalam Renja Perubahan Tahun 2023 penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan/pedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tujuan ke - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Sasaran ke- 4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya rumah Layak Huni bagi Korban bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah.
 - Penanganan, Penyediaan dan fasilitasi Rumah layaa huni bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah sebagai Upaya Pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat, dan
 - Pembangunan, Peningkatan Lingkungan Perumahan yang layak, sehat, aman,yang didukung prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan Perumahan yang memadai sebagai penunjang fungsi hunian,
- 2) Tercegahnya luas area kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang berpotensi permukiman kumuh diluar kawasan kumuh di bawah 10 Ha
Dengan Penataan, Peningkatan dan Pemeliharaan terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terutama terhadap nfrastruktur perumahan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh yang teridentifikasi berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh baru, dilakukan upaya pencegahan/peningkatan infrastruktur PSU perumahan permukiman pada kawasan permukiman berpotensi slump area (kumuh baru) agar tidak memicu meluas dan bertambahnya kawasaan permukiman Kumuh.
- 3) Berkurannngnya rumah tidak layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.
Dengan meningkatkan akses rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah yang layak huni terutama yang berada diluar Kawasan Permukiman Kumuh serta permukiman Kumuh dengan memberikan Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSRS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya slump area (kumuh baru)
- 4) Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha.
- 5) Berkurannngnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.
Penataan, Peningkatan dan Pemeliharaan terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum terutama terhadap infrastruktur perumahan permukiman kumuh, sehingga tetap terjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman kumuh menjadi layak huni, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya dan produktif, serta Fasilitasi BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Permukiman Kumuh.
- 6) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.
Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu Pengelolaan, Pengendalian, Pemanfaatan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Pertanahan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan dapat mencapai sasaran yang menjadi prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2023 dan dapat mencapai target pada Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Singkawang, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	65
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	68
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	93
BAB III : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	96
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	96
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	99
3.3. Program dan Kegiatan	102
BAB IV : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	109
BAB V : PENUTUP	128
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan..

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib / Pilihan urusan pemerintahan daerah

yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana yang menunjukkan prakiraan maju tahun n dan $n+1$.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan merupakan salah satu Dinas pengampu/pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Wajib Pertanahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang, terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor

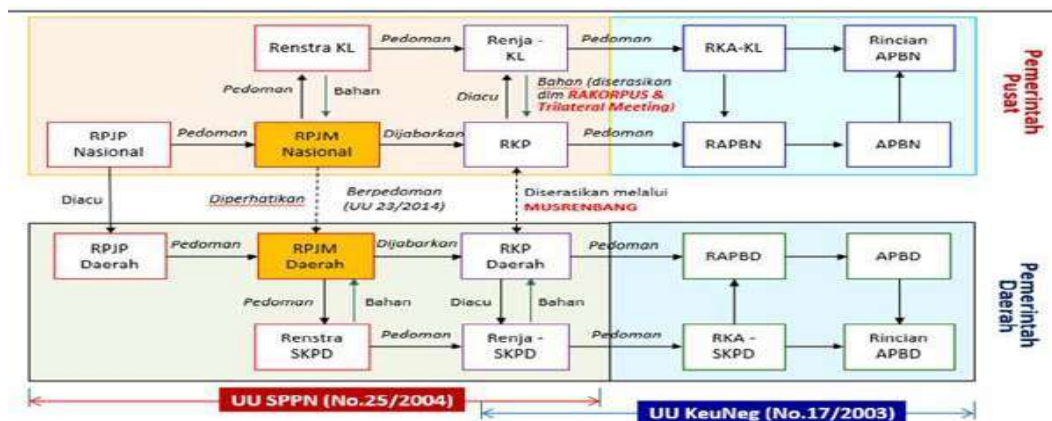
061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang

. Dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran operasional tahun ke 1 (satu). Disamping itu, Renja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus Pembangunan Daerah tahun 2023, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Perubahan RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun anggaran 2023, serta bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu penyusunan Renja bepedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Singkawang Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan RENJA (Rencana Kerja) PD menjadi RENJA Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Singkawang, dengan Rentra dan Renja Perangkat Daerah dan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1

Gambar 1.1



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor1);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
24. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
25. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 14);
26. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023– 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Menjabarkan arah Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk periode 1 tahun yaitu tahun 2023, yang merupakan landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam arti menggambarkan capaian kinerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang selama satu tahun berjalan tahun 2023.
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 Sebagai Dokumen Perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang.
2. Mendeskripsikan tentang program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menciptakan kepastian dan perencanaan program kegiatan kerja Dinas dalam periode 1 tahun (tahun 2023) sehingga terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam Perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.
3. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Renja

Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 5 bab dengan penyajian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
 - 1.4. Sistematika Renja
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun Berjalan) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada *(Lampiran Tabel 2.1 Form Tabel-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 tahun berjalan* sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.33.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.	04.									
1.	04.	01.								
1.	04.	01.	2.01							
		01								
		02								
		03								

					Perubahan RKA-SKPD																					
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	5	Dokumen										1					1,0			20,00
				05	Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	5	Dokumen										1					1,0			20,00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 Dokumen)	25	Dokumen										5					5,0			20,00
						Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Dokumen	25	Dokumen										5					5,0			20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah																		
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)																	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)																	
	07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 Dokumen)	16	Dokumen					5			5,0														31,25

1.	04.	01.	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 orang/48 Bulan	-	-	-	-	36 Orang/12 Bulan	36 Orang/12 Bulan	25,00
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	-	-	-	1	1	20,00
			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	-	-	-	1	1	20,00
			04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	-	-	-	1	1	20,00
			05	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	-	1	1	20,00
			06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2	8 Dokumen	-	-	-	-	2	2	25,00
1.	04.	01.	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
			03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00
					Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00
			05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	48 Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00

					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
				06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan				1	1	25,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah					
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
1.	04.	01.	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	1	1	25,00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	-	-	-	-	2	2	25,00
						2) Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	-	-	-	-	1	1	25,00

				05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1)	4	Paket	-	-	-	-	1	1	25,00
				06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				09	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1)	48	Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
				10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1)	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1)	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		8 = (7/6)	9
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.	04.	01.	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	-	-	-	100	50	12,50
			01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
			02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1)	48 Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
					- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
1.	04.	01.	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1)	1 Unit/12 bulan	-	-	-	-	1	1	100,00
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1)	19 Unit	-	-	-	-	4	4	21,05
			09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	-	-	-	-	1	1	25,00

						yang Dipelihara/Direhabilitasi													
				10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	320	Unit							80	80	25,00		
1.	04				URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
					BIDANG PERUMAHAN RAKYAT														
1.	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	400	%	-	-	-	-	-	100	100	25,00			
						2 Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	100	%						50	50	50,00			
1.	04.	02	2.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400	%	-	-	-	-	-	100	100	25,00			
				06	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	25,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 04 02 2 03.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
1 04 02 2 03. 01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	24 Unit Rumah	-	-	-	-	6	6	25,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1)	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 1)	24 Unit Rumah	-	-	-	-	2	2	8,33
1. 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum (PSU) 1.	79,27 %	-	-	-	-	78,52	78,52	99,05
		Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang 2.	60 %	-	-	-	-	15,00	15,00	25,00
1. 04. 05 2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan 1).	400 %	-	-	-	-	100,00	100	25,00

				01	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	80	Lokasi/Paket	-	-	-	-	33	33	41,25
				03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan	4	Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00
				05	Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4	Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
				BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN									
1.	04.	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	67,31 %	-	-	-	-	15,08	15,08	22,40
					2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	92,25 %	-	-	-	-	25,00	25,00	27,10
1.	04.	03	2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya	8,63 Ha	-	-	-	-	2	2,00	23,17
					2. Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh	400 %	-	-	-	-	100	50,00	12,50

						(dengan luas dibawah 10 Ha)									
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1) Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) danDetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	12	Dokumen	-	-	-	-	4	4	33
				02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	80	Unit	-	-	-	-	17	17	21,25
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang * mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)	80	Unit/KK	-	-	-	-	17	17	21,25
						Jumlah Fasilitasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	4	Dokumen/Kegiatan	-	-	-	-	1	1	25,00
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	20	Unit					17	17	85,00
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAK)	60	Unit					0	0	0,00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah				
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/ Dipugar	1)	8,94 Ha	-	-	-	2	2	22,37		
1.	04.	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	80 %	-	-	20,00	20,00	25,00		
				2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	0,04 %	-	-	1,57	1,57	3925,00		
1.	04.	04	2.03	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	20 Ha	-	-	-	5	5	25
			01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1).	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	99 Unit	-	-	-	18	18	18,18
					+	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK+DAU)	880 Unit	-	-	-	18	18	2,05
					-	Jumlah Fasilitasi/Monitoring dan BOP Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	4 Dokumen	-	-	-	1	1	25,00

						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	32	Unit					1	1	3,13
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK)	848	Unit					0	0	0,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah						
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)					
		BIDANG PERTANAHAN													
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
2	10	04	201		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen/Laporan Berita Acara	-	-	-	-	1	1	25,00
						Jumlah Dokumen Pendampiangn Hukum (Litigasi/Non Litigasi)	4	Dokumen/Laporan Berita Acara	-	-	-	-	1	1	25,00
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00

2	10	05	201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
			02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	-	-	-	-	4	4,00	100,00
					Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman # yang terdampak Pembangunan	400	%	-	-	-	-	100	100,00	25,00
					- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1,00	25,00
					Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota)	1	Dokumen	-	-	-	-	1	1,00	100,00
					Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	1	1,00	100,00
2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan	400	%	-	-	-	-	100,00	100	25,00
2	10	08	202	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
			01	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	4	Dokumen	0	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako) - Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen					1	1	100,00
		Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam - keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	0		-	-	1	1	33,33
2	10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1. Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	400 %	-			100,00	100	25,00
2	10 09 201	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1) Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	400 %	-			100	100	25,00
		01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4 Dokumen				4	4,00	100,00
			Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan (- Pendataan PTSL)	4 Dokumen				1	1,00	25,00
			- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan	4 Dokumen				-	0,00	0,00
		02 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian 1) Pemanfaatan Tanah Negara	4 Dokumen				1	1,00	25
			Jumlah Dokumen Database SKT/SPT yang - terinput pada Aplikasi SIPETA	1 Dokumen				1	1,00	100

					Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi - bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)	3.260	Persil					0	0,00	0
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	400	%	-				100,00	100,00	25,00
2	10	10	201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	400	%	-				100	100	25,00
				01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8	Laporan/Dokumen					4	4,00	50,00
					- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan	2	Kelurahan					1	1,00	50,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pengukuran dan Pemetaan - Bidang Tanah	1 Dokumen					1	1,00	100,00
		Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang - Pengadaan Tanah Skala Kecil	1 Dokumen					1	1,00	100,00
		Jumlah Software Informasi Pertanahan yang - dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan (berkala)	1 Software/Aplikasi					1	1,00	100,00
		Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami - Kebijakan Pertanahan	500 Orang					0	0,00	0,00

						Jumlah Peserta Penyuluhan yang memahami - Hukum Pertanahan	200	Orang						0	0,00	0,00
				02	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan 1) Pelayanan Pertanahan Lainnya	4	Dokumwn						1	1,00	25,00
						Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi - kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi	19	Kelurahan						9	9,00	47,37
						Jumlah Luas Tanah wilayah Administrasi - Kelurahan yang terpetakan	22	Kelurahan						0	0,00	0,00
						Jumlah Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan - Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah	4.000	M						0	0	0
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan - Pertanahan	1	Dokumen						0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang di kaji si sesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berkenaan. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam tabel Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 yang mana baru dimulai pada tahun 2023 ini, maka menguraikan evaluasi Capaian Renstra tahun 2018-2022 seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Form Tabel. T-C.30)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023. TW .II	2023	2024		
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar														
A. Bidang Perumahan Rakyat														
I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	100%	100,00%	100,00%		SPM PerumahanRakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	0%	100,00%	100,00%		SPM PerumahanRakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		%	91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	97,91%	97,91%	98,03%	97,97%		Permendagri86/2017
4	Persentase Rumah Layak Huni			91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	91,42%	97,91%	91,91%	98,03%		IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
5	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		RENSTRA

6	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah					50%				30%	50%			RENSTRA
7	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)					78,52%				78,31%	78,31%			RENSTRA
8	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara					15%				0%	15%			RENSTRA
9	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani					39,43%	55,47%			0%	39,43%	55,47%		PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023. TW .II	2023	2024		
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar														
B Bidang Kawasan Permukiman														
10	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani					47,74%				35,02%	47,74%			IKU DISPERKIMTA
11	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani					26%				0%	26%			IKU DISPERKIMTA
12	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang					12,5%				0%	12,5%			IKU DISPERKIMTA

13	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha			-	-	12,5%	-	-	-	0%	12,5%	-	IKU DISPERKIMTA
14	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni			-	-	1,57%	-	-	-	0%	1,57%	-	RENSTRA
15	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha			-	-	15,06%	-	-	-	0%	15,06%	-	RENSTRA
16	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		%	-	-	21,05%	24,47%	-	-	17,64%	21,05%	24,47%	Permendagri 86/2017
17	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh			-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%	IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
18	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani			-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%	PERUBAHAN RENSTRA
19	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani			-	-	5,4%	10,81%	-	-	5,4%	5,4%	10,81%	PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023. TW .II	2023	2024		
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
C Bidang Pertanahan														
III Pertanahan														
20	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
21	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
22	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	-	-	-	0%	100%	-		RENSTRA
23	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
24	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
25	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
26	Persentases Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	34,61%	-	-	-	15,38%	34,61%	-		RENSTRA
27	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
28	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA

29	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		IKU - DISPERKIMT A 2023-2026
30	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
31	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	100%	-	-	0%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
32	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	-	36,84%	-	-	-	-	36,84%		PERUBAHAN RENSTRA
33	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi			-	-	-	33,33%	-	-	-	-	33,33%		PERUBAHAN RENSTRA
34	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	-	79,77%	84,82%	-		76,39%	79,77%	84,82%		PERUBAHAN RENSTRA
35	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	7%	12%	-		4,99%	7%	12%		PERUBAHAN RENSTRA

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA (IKU)
TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2018-2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI TAHUN						TARGET RENSTRA TAHUN				AKHIR PERIODE 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	89,47 %	89,68 %	90,51 %	91,17 %	91,42 %	97,91 %	90,48 %	91,23 %	91,25 %	91,75 %	92,25 %
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	44,77 %	80,63 %	84,68 %	88,73 %	52,20 %	57,33 %	50 %	55 %	85,01 %	85,34 %	85,67 %
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.

Tabel 2.3 pada tahun 2022 Persentase Rumah layak huni sebesar 97,91%, dan melebihi target akhir periode Renstra, dengan formulasi/rumusan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2022 dikalikan 100% (dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 58.451 unit rumah dan jumlah seluruh rumah 59.700 unit rumah), terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 6,49% jika dibandingkan pada tahun 2021, data jumlah rumah didapat dari revidi/updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2022.

2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Tabel 2.3 Pada tahun 2022 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 57,33% maka belum mencapai target akhir periode renstra, kawasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan 76,02 ha. Dan dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2022 merupakan target akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target

terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah, sedangkan rencana target Penanganan luas kawasan permukiman kumuh sampai akhir periode Renstra/RPJMD masih mengacu pada angka semula dengan target akumulasi sebesar 85,67% serta belum dilakukan revisi terhadap target pada dokumen Renstra, disisi lain penyusunan revisi Renstra dan RPJMD sudah berlalu. dan perlu adanya penyesuaian kembali/revisi terhadap rencana target pada periode Renstra mendatang.

Jika dihitung berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,64%) dan masih terdapat sebesar 48,24 ha atau 82,36 % yang belum tertangani pada tahun 2022 terhadap SK terbaru.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Tabel 2.3 pada tahun 2022 tercapai 100% jika dibandingkan dengan Target Akhir Periode Renstra tahun 2022. Maka dapat mencapai target.

➤ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Program Pengembangan Perumahan.

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Bencana yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan persiapan untuk administrasi Korban Bencana tidak dapat disiapkan dari awal dan di sisi lain dinas terkait menunggu terbitnya SK Korban Bencana dari Pemerintah. Terbitnya SK Korban Bencana sebagai acuan untuk memulai kegiatan menjadi salah satu faktor penting, sedangkan warga yang terdampak bencana harus ditangani sesegera mungkin.
2. Pada Tahun 2022 ada Peristiwa kejadian bencana (bencana alam tanah longsor) yang terjadi pada triwulan II dan dilakukan penanganan dengan target 5 unit rumah dan realisasi fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala keluarga, namun pada sisi penyerapan anggaran

tidak maksimal karena tingkat kerusakan rumah akibat bencana tanah longsor kategori rusak ringan, dan pagu anggaran estimasi pada kondisi tingkat rusak berat.

3. Pada Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target 2 unit rumah/Kepala Keluarga, dan realisasi fisik 100% sejumlah 2 unit rumah/Kepala keluarga, namun dari sisi penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan 1 unit rumah terdampak pembangunan Gerbang Selatan yang di biayai dari APBD Kota Singkawang dan sisanya 1 unit rumah terdampak pelebaran jalan di kelurahan setapak kecil pada saat dalam proses pemberian bantuan tidak mau menerima bantuan relokasi dari pemerintah.
4. Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

2) Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman. Pada tahun 2022 Pendataan PSU telah dilakukan yang difokuskan pada lingkungan perumahan yang dibangun oleh Pengembang/Developer, akan tetapi Disperkimta khususnya bidang perumahan rakyat belum dapat membuat dokumen standar yang harus dipenuhi dari satu kawasan yang dibangun oleh pengembang perumahan. Kawasan yang dimaksud adalah termasuk rumah dan PSU yang harus disediakan pengembang dan untuk penentuan standar perkawasan diperlukan koordinasi lintas OPD seperti ke bidang penataan ruang Dinas PUPR kota Singkawang untuk mengetahui pembagian zona dari setiap wilayah di kota singkawang.
2. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan adanya nama lokasi (gang/Jalan) yang tidak sesuai dilapangan ketika verifikasi perencanaan pembangunan/peningkatan PSU terutama pada Pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan serta adanya penolakan dari warga setempat saat pekerjaan fisik akan dilaksanakan terkait lahan/tanah yang akan dilalui rencana pembangunan PSU Perumahan (Jalan lingkungan perumahan dan saluran drainase lingkungan perumahan).
3. Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami

kendala. Kendala yang dimaksud adalah kesulitan dalam menemukan sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang atau tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan sertifikat tersebut. Telah dilakukan konfirmasi ke BPN Kota Singkawang dan dinyatakan bahwa sertifikat PSU yang dimaksud sudah berada di tangan pengembang sendiri.

4. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

3) Program Kawasan Permukiman.

1. Pada Program Kawasan Permukiman kegiatan penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha dan kegiatan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan deliniasi baru dan dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani mulai pada tahun 2021 hingga tuntas, dan DISPERKIMTA melaksanakan Program Kawasan Permukiman yang merupakan upaya penataan dan peningkatan, pencegahan/pemeliharaan kualitas infrastruktur permukiman kumuh di kota singkawang secara terpadu dan berkelanjutan terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, produktif dan berkelanjutan.

- Berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,63 %) dan masih terdapat sebesar 48,24 ha atau 82,36 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.
2. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RPJMD serta pada Dokumen Perjanjian Kinerja dengan target secara akumulasi sebesar 85,34% pada tahun 2021, sedangkan realisasi secara akumulasi tercapai 52,20% disebabkan adanya penambahan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang sesuai SK Wali Kota terbaru tanggal 29 September 2020, yaitu : SK Wali Kota Singkawang Nomor : 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.
 - Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2022 merupakan target akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah.
 3. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh diperkotaan dan mendukung gerakan nasional program Kota tanpa kumuh (Kotaku) Gerakan 100-0-100 (100% air minum layak, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak), dan dari aspek pendanaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta keterlibatan swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).
 4. Pada tahun 2022 dilaksanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dengan total 13 paket pembangunan/pemugaran/peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimta, dari hasil evaluasi hanya terdapat 4 paket jalan lingkungan yang masuk dalam deliniasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sedangkan 9 paket jalan lingkungan merupakan usulan pikir pada sasaran di luar kawasan

delineasi kumuh sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru.

5. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan sasaran kegiatan lokasi kawasan permukiman kumuh, adapun pekerjaan yaitu Peningkatan Jalan di RT/RW.005/003 dan RT/RW.007/002 di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, namun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan luasan (Ha) perumahan kumuh dan permukiman kumuh, secara penghitungan data yang dilakukan tim KOTAKU terhadap Peningkatan Jalan hanya mengurangi sedikit indikator kekumuhan, sedangkan indikator pengurangan kumuh yang dilakukan Tim KOTAKU yang berdampak lebih besar terhadap pengurangan kumuh di Kelurahan Kuala yaitu kepada kegiatan Pembangunan/Pemugaran/Peningkatan Saluran lingkungan.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1) Program Pengembangan Perumahan.

Pada tahun 2022 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 5 unit rumah dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 2 Unit rumah maka total rencana target 7 unit rumah. Pada tahun 2022 di triwulan II ada kejadian bencana alam (tanah longsor) yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah 5 unit rumah masyarakat, adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Mengupayakan terbitnya SK Korban Bencana sesegera mungkin dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penganggulan rumah terdampak korban bencana serta memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.
2. Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2022 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/425/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor RT.032. RW.013 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat dan RT.001, RW.001 Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan target 5 unit dan realisasi sejumlah 5 unit rumah/Kepala keluarga maka capainnya 100% yang dibiayai anggaran APBD tahun 2022.
3. Penanganan rumah bagi masyarakat yang terdampak/terkena relokasi program pemerinatah pada tahun 2022 dengan target 2 unit rumah/Kepala keluarga dan realisasi 2 unit maka capaian 100%, sejumlah 1 unit rumah dibiayai anggaran APBD tahun 2022 berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor : 653/200

/PERKIMTA.PERUM-A /TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Rumah Khusus Bagi Warga Terdampak Proyek RT.065 RW.010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2022, dan 1 unit rumah warga yang terdampak pelebaran jalan di kelurahan setapak kecil menggunakan biaya swadaya dari warga tersebut.

4. Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting yang ada dengan melaksanakan kegiatan/sub kegiatan identifikasi, pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu:
 - 1). Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 109.208.800 realisasi Rp.106.192.015 (97,24%) output pekerjaan penyusunan dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.
 - 2). Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, pagu anggaran Rp. 109.208.800 realisasi Rp.106.192.015 (98,61%) output pekerjaan penyusunan dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.
 - 3). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, pagu anggaran Rp. 259.208.800 realisasi Rp.255.610.780 (98,61%) target 2 dokumen realisasi 2 dokumen dan capaian 100%..
5. Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.
6. Persentase Rumah Layak Huni tercapai 97,91% dan melebihi target sebesar 92,95% dengan capaian 106,13%, data Persentase Rumah Layak Huni tersebut diperoleh dari review/updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen master plan (rencana induk) sehingga terjadi perubahan data jumlah rumah di Kota Singkawang, dokumen tersebut disusun pada tahun 2022 dan dianggarkan melalui APBD tahun 2022 dan DPA DISPERKIMTA tahun 2022.
7. Pada tahun 2022 melaksanakan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengajukan

permohonan perbaikan rumah, memudahkan pihak Kelurahan/Kecamatan menginput permohonan usulan warga dan memudahkan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam memverifikasi dan mendata jumlah RTLH yang diajukan.

8. Menyiapkan Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni baik yang berada di dalam delineasi kawasan kumuh sesuai SK Wali Kota No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maupun di luar kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
9. Mengupayakan kegiatan pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun anggaran berikutnya dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.
10. Pada Tahun 2022 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh Balai Prasarana Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I (BP2P) sejumlah 25 Unit sejumlah 25 Unit yang tersebar di 4 Kecamatan (11 unit rumah di Singkawang Utara, 7 unit rumah di Singkawang Tengah, 4 unit rumah di Singkawang Timur dan 3 unit rumah di Singkawang Barat), serta dari DAU-APBD tahun 2022 sejumlah 39 unit yang pelaksanaannya dari bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang berdasarkan SK Wali Kota Nomor 400/407/SETDA.KESRA-C Tahun 2022 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD TA. 2022, maka total sejumlah 64 unit penanganan RTLH yang rumahnya di rehabilitasi menjadi rumah layak huni.
 - Penanganan rumah tidak layak huni yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) untuk kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dan untuk kegiatan dari Dana APBN terhadap kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Singkawang tetap menjadi perhatian serius/salah satu prioritas dari Pemerintah Kota Singkawang agar tetap berkelanjutan dan berkesinambungan hingga tuntas kota dari RTLH, upaya penanganan berdasarkan skala Prioritas dan dilaksanakan secara bertahap melalui Sumber Dana APBN dan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas rumah sehat, sederhana dan layak huni dalam rangka Perbaikan kualitas Perumahan/Rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
11. Penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Singkawang melalui DISPERKIMTA pada tahun 2022 telah mengajukan usulan sejumlah 1.249 Unit Rumah RTLH yang terverifikasi dalam usulan agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi prioritas penanganan pada tahun 2022 serta tahun berikutnya.

2) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU).

1. Pada Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU), Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang di harapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
2. Hearing dan koordinasi dengan warga untuk mendapatkan solusi serta surat Kesepakatan/Persetujuan warga terkait tidak keberatan atas Lahan/Tanah yang akan dibangun, atau lokasi pelaksanaan tidak dikerjakan, digeser pada APBD Perubahan dan Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama pada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan.
 - a.. Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama pada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan.
 - b. Mengusulkan pergeseran/rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan.
3. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
4. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama di masa yang akan datang.
7. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase

lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 3.252M'/34 paket Jalan lingkungan Perumahan dan 2.489 M'/21 Paket Saluran Drainase lingkungan Perumahan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 3.253,13M'/34 Paket (100%) dan realisasi panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan 2.489M'/21paket (100%). Dengan pagu anggaran Rp. 6.444.813.800 realisasi Rp. 6.182.030.569,59 (95.92%) melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

9. Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

3) Program Kawasan Permukiman.

1. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan,
2. Dengan adanya SK Wali Kota Singkawang terbaru yaitu SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 maka pada periode mendatang perlu adanya penyesuaian/revisi target rencana penanganan Luasan Permukiman Kumuh pada dokumen perencanaan strategis Renstra Diperkimta dan RPJMD terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) karena pada rencana target dan realisasi capaian Kinerjanya dihitung secara akumulasi sehingga berpengaruh menjadi relatif rendah
Adapun perspektif capaian diuraikan sebagai berikut :

10.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	80,63	84,68	88,73	52,20	57,33
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023

Pada Tabel 2.4 Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni

Tabel. 2.5
Capaian Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase luas lahan bersertifikat(%)	59,31	59,58	61.26	56.10	62.92	Sumber ATR/BPN Kota Singkawang
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara(%)	n/a	100	100	100.	100	DISPERKIMTA Memfasilitasi Penyelesaian Konflik sengketa Pertanahan, dan Lintas OPD
3.	Penyelesaian izin lokasi(%)	n/a	100	100	n/a	n/a	Berada di Dinas Penanaman Modal

Sumber: Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, tahun 2023

Pada Tabel 2.5 Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

- a. Semula target penanganan pada dokumen Renstra terhadap SK lama yaitu SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha dengan rencana target penanganan sampai akhir periode sebesar 85,67% yang terdapat pada Dokumen Renstra/RPJMD tahun 2018-2022, namun dalam perjalanannya pada tahun 2020 dilakukan review baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkannya SK terbaru yaitu SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka terdapat 2 SK Walikota yang menjadi acuan, dan total luasan Kawasan permukiman kumuh menjadi bertambah sebesar 132,6 Ha, sedangkan rencana target Penanganan luas kawasan permukiman kumuh sampai akhir periode Renstra/RPJMD masih mengacu pada angka semula dengan target akumulasi sebesar 85,67% serta belum dilakukan revisi terhadap target pada dokumen Renstra, disisi lain penyusunan revisi Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 sudah berlalu.
 - b. Jika dihitung dari total luasan permukiman kumuh pada rencana semula target (SK lama) yang akan ditangani selama 5 tahun sejak 2018-2022 adalah sebesar 38,08 Ha atau 40,90% (target akhir 85,67% - dikurangi kondisi awal 44,17% = 40,90%), dan tercapai sebesar 42,88 Ha atau 141,62% maka sudah melebihi dari target semula sebesar 85,67% terhadap luasan permukiman kumuh dengan mengacu pada SK lama.
 - c. Jika dihitung dari total luasan permukiman kumuh pada rencana semula target (SK lama tahun 2016) yang akan ditangani selama 5 tahun sejak 2018-2022 adalah sebesar 30,28 Ha atau 40,90% (target akhir 85,67% - dikurangi kondisi awal 44,17% = 40,90%), dan pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 32,55 Ha atau 88,73% dengan capaian 107,49% terhadap target 85,67% dengan mengacu pada SK lama.
 - d. Jika dihitung sesuai target akhir periode tahun 2022 secara akumulasi persentase (%) kawasan permukiman kumuh yang ditangani adalah sebesar 85,67% dengan mengacu pada 2 SK Wali kota (SK lama tahun 2016 + ditambah SK baru tahun 2020) terhitung mulai sejak tahun 2021 hingga sekarang tahun 2022 dengan total luasan 132.60 Ha, dan realisasi secara akumulasi tercapai sebesar 76,02 Ha atau 57,33% dengan capaian 66,92% maka belum mencapai target akhir periode Renstra.tahun 2022.
3. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (pembangunan dan peningkatan jalan/saluran) di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020.

4. Melakukan Koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan pembentukan Forum PKP.
6. Pokja PKP bekerjasama dengan Tim Akademisi dari Universitas Tanjungpura dalam hal perbaikan, pengelolaan dan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) terhadap bangunan fisik Promenade Kuala Simpang yang sudah dibangun di RT/RW.010/003 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat agar dapat memperpanjang umur bangunan dan memfungsikan bangunan sesuai peruntukannya.
7. Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku yang sarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi dengan tenaga Pendamping/Fasilitator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang merupakan Wadah bersama agar lebih fokus, terarah dan terpadu dalam arti bersinergi dan terintegrasi dalam rangka Penataan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.
8. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan bersinergi pada Program Pemerintah Pusat yang menjadi Prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) KOTA-Ku dan sarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan masyarakat melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam Pelaksana fisik Pembangunan, Pemaanfaatan dan Pemeliharaannya juga di kelola oleh LKM.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

1) Program Sengketa Tanah Garapan.

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan

Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:

- a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang ;
- b) Masih kurang pahamnya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya;
- c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pengadaan Tanah SMP Negeri 03 Singkawang;
 - Belum adanya peraturan yang mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil (≤ 5 Ha).
 - Proses Pengadaan Tanah terkendala karena pemilik lahan meninggal dunia sehingga untuk proses selanjutnya harus turun waris alas hak tanah.
- b) Pengadaan Tanah Jl. Lingkar Barat (*By Pass*) Kota Singkawang
 - Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2022, sehingga waktu penyelesaian pengadaan tanah relatif singkat;
 - Kurangnya informasi data pemilik lahan/tanah yang terdampak Pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Daerah.

3) Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.

4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.

5) Program Penatagunaan Tanah.

- 1) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
 - a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan lahan/tanah tidak memiliki patok batas.
 - b) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual lahan/tanah miliknya sendiri.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

1) Program Sengketa Tanah garapan.

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan.

- a. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
- c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

- a. Belum Peraturan Daerah (RAPERDA)/ Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil (≤ 5 Ha);
- b. Proses pengadaan tanah SMP Negeri 03 Singkawang dilanjutkan pada Anggaran tahun 2023 dengan skema anggaran mendahului dan memproses dokumen turun waris.
- c. Penyusunan kegiatan pengadaan tanah Jl. Lingkar Barat (By Pass) Kota Singkawang dilanjutkan pada anggaran awal tahun untuk memaksimalkan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- d. Koordinasi ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang, OPD terkait dan juga berkoordinasi kepada Kelurahan, RT/RW dan Masyarakat setempat.

3) Program Pengelolaan Tanah Kosong.

- a. Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk

dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang.

4) Program Pengelolaan Tanah Negara.

- a. Melakukan penempatan aparatur sesuai keahlian dan kemampuannya serta melakukan Bimtek atau pelatihan bagi aparatur bidang pertanahan.

5) Program Penatagunaan Tanah.

- a. Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dimohon/diukur.
- b. Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak lahan/tanah.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Pengampu yang menangani Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pertanahan. Untuk Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang antara lain pada aspek pelayanan umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum Bidang pertanahan Tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio rumah layak huni	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072	0.2432
2.	Rasio permukiman layak huni	0,9874	0,9986	0,9987	0,973	0.9757
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97.91
4.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	94,06	98,69	99,53	99,60	99,63
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	67,53	69,56	69,80	69,96	70,29
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,029	0,023	0,017	0,109	0.0957
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	80,63	84,68	88,73	52,20	17,64
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	75,96	76,50	77,35	78,27	79.31
9.	Persentase rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97.91

A. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Perumahan Rakyat

Standar pelayanan minimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.SPM Maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melaksanakan pelayanan Dasar yaitu SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu :

➤ **Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Capaian SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat.**

Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

a) Jenis Pelayanan Dasar

b) Mutu Pelayanan Dasar

c) Penerima Pelayanan Dasar.

- (1) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (3) Penerima Pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar (setiap rumah tangga) yang memenuhi Kriteria.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota..
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Pelayanan Dasar SPM Sub urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan

dasar Urusan Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.7 dan 2.8) dengan Pencapaian sebagai Berikut :

Tabel 2.7

Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Tabel 2.8

Target Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/Rencana kebutuhan dan rencana aksi

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

Pengertian :

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

1 Jenis Pelayanan :

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada Saat Pasca bencana.
- 2) Surat Penetapan Bencana dari Bupati/Walikota.
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur

2. Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

Pengertian :

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- a) “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan :

- 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);

Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau

Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung

Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau

Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukitan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Tabel 2.9.
Realisasi Capaian Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 % setiap Tahun	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 % setiap tahun	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.10.
Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2021		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	100 % (5 Unit)	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 % (2 Unit/KK)	0	0	0	0	30 Warga Terdampak	100%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Kejadian Bencana ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun uraian realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

a. **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota**

Berdasarkan tabel 2.8, 2.9 dan 2.100 diatas menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota pada tahun 2022 dengan capaian 100%, Pada tahun 2022 terdapat 5 unit rumah warga akibat kejadian bencana tanah longsor (alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/425/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor beralamat di Tanjung Batu Harapan RT.001 RW.001 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan berjumlah 2 unit rumah dan di Jl. Ayani Gg. Batu Mas RT.032 RW.013 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat berjumlah 3 unit rumah Tahun Anggaran 2022, dengan anggaran APBD-P Tahun 2022 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA dengan Program Pengembangan Perumahan pagu dana Rp. 121.997.100 dan realisasi anggaran Rp. 24.827.800 (20.35%) dengan realisasi fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala Keluarga dengan pagu anggaran tahun 2022 sebagaimana tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	721.517.400	558.708.010	77.44 %
	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	477.626.400	467.994.810	97.98 %
1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	109.208.800	106.192.015	97.24 %
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	109.208.800	106.192.015	97.24 %
3.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	259.208.800	255.610.780	98.61 %
	2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	243.891.000	90.713.200	37.19 %
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	121.997.100	24.827.800	20.35 %
2.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	121.893.900	65.885.400	54.05 %

Sedangkan pada Tahun 2018-2021 capaian 0% (Tabel 2.9, dan 2.10) di karenakan tidak ada peristiwa Kejadian Bencana Alam yang di tetapkan oleh Kepala Dearah sejak tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA, namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

Demikian juga pada Tahun 2020, terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganannya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2020 tidak tercapai (0%).

b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.

Berdasarkan tabel 2.9 dan 2.10 diatas pada tahun 2022 Capaian SPM 100%, untuk pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota di anggarkan pada APBD Induk Tahun 2022 dan APBD-P Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar Rp. 121.893.900 dan realisasi anggaran Rp. 65.885.400 (54.05%) dengan realisasi fisik 100%

dimana target 2 unit rumah dan terealisasi 2 unit rumah, namun dalam penyerapan anggaran 1 unit rumah di biayai anggaran APBD dan 1 unit rumah menggunakan biaya swadaya dari warga yang terdampak relokasi program pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dengan capaian SPM 0%.

Pada tahun 2019 tabel 2.9 dan 2.10 Capaian SPM Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota tercapai 100% dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan kuala Kecamatan Singkawang Barat dengan penerima manfaat layanan sejumlah 30 WTP (warga terdampak) 30 unit rumah/Kepala Keluarga yang direlokasi dengan rincian 13 WTP diberikan dana santunan Kerohiman dan 17 WTP dana pembangunan rumah baru yang semula berada dipermukiman Kumuh Kel.Kuala (bertempat tinggal/berdiam di bantaran sungai), adapun Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00 (24%), dengan Kegiatan :

- 1) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampak Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala dari Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 hanya terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau sebesar (24%).

Tabel 2.12

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022 (Bidang Perumahan Rakyat)

No	Jenis Indikator	Target Daerah (RPJMD) 2022	Target Renstra 2022	Realisasi					KET
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Rasio rumah layak huni	0.230	0.2200	0.2044	0.2060	0.2070	0.2072	0.2432	Permendagri 86/2017
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,25%	91,75%	89.68 %	90.51 %	91.17 %	91.42 %	97.91 %	Permendagri 86/2017
3.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	99.42%	97,42%	94,06 %	98,69 %	99,53 %	99,60 %	99,63 %	Permendagri 86/2017
4.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	79.81%	78,81%	75,96 %	76,50 %	77,35 %	78,27 %	79,31 %	Permendagri 86/2017

Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Capaian Kinerja terkait pada bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

1. Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Tabel 2.12 Rasio rumah layak huni tahun 2022 tercapai 0,2432 yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2022 sejumlah 240.327 Jiwa.

Pada Tahun 2021 Rasio rumah layak huni tahun 2021 mencapai 0,2072.

Rasio rumah Layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2072, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.604 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2021 sejumlah 239.377 Jiwa.

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa..

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa..

Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 48.909 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2019 sejumlah 237.429 Jiwa. peningkatan rasio tersebut dikarenakan adanya perubahan/konsolidasi data penduduk (sumber data penduduk tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang).

2. Indikator ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2.12 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 tercapai 97.81% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2022 sejumlah 59.700 unit rumah

Pada tahun 2021 Cakupan Ketersediaan rumah layak hun di Kota Singkawang mencapai 91.42% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.3604 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2021 sejumlah 54.261 unit rumah.

3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Pada Tabel.2.12 Tahun 2022 tercapai 99.63% dan

4. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pada Tabel.2.12 Tahun 2022 tercapai 79.31%

B. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Kawasan Permukiman

Capaian Indikator Kinerja terkait pada Bidang Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13

Capaian Indikator Kinerja (Pada Bidang Kawasan Permukiman)

No	Indikator	Target Daerah (RPJMD) 2022	Target Renstra 2022	Realisasi						KET
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase luasan permukiman kumuh Dikawasan Perkotaan	85.67%	85.67%	44,77 %	80,63 %	84,68 %	88,73 %	6,03 %	17,64 %	Permendagri 86/2017
2.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0062%	0,0062%	0,0811	0,0285	0,0225	0,017	0,109	0,0957	Permendagri 86/2017
3.	Persentase Permukiman yang Tertata	75.56%	75.56%	-	67,32 %	69,46 %	69,80 %	69,80 %	70,29 %	Permendagri 86/2017
4.	Rasio Permukiman Layak huni	0,9900	0,9900	0,9720	0,9874	0,9986	0,9987	0,9725	0,9767	Permendagri 86/2017

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

1) Indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan.

Dengan pengertian luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.13 pada Tahun 2022 I Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 10,33 Ha (17,64%) terhadap SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57.

Tabel 2.13 pada Tahun 2021 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 3,53 Ha (6,03%) terhadap SK terbaru. Jumlah total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.

Pada Tabel 2.11 capaian Tahun 2020 terkait indikator Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 62,69 Ha (88,73%) terhadap SK lama (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016) dengan Jumlah luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani seluas 65,69 Ha (88,73%) dari jumlah total 74,02 Ha luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh). Dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani, maka dengan demikian terjadi peningkatan penanganan sebesar 4,05% pada Tahun 2020 jika dibandingkan pada Tahun 2019 dengan luas 62.69 Ha (84.68%).

2) Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh.

Dengan rumusan persamaan yaitu *Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibagi luas Wilayah dikalikan 100%*

Tabel 2.13 Capaian Tahun 2022 sebesar 0,0957% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang* sejumlah 58,57 Ha.

Tabel 2.11 Capaian Tahun 2021 sebesar 0.017% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh* sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha

Capaian Persentase lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 sebesar 0.0017% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh* sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha,

Perhitungan data Capaian Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada Tahun 2019 secara akumulasi tercapai 0,0285% sedangkan pada Tahun 2018 tercapai 0,0811 % dari luas wilayah Kota Singkawang.

3) Persentase Permukiman Yang Tertata

Pengertian Persentase Permukiman yang tertata dengan rumusan persamaan yaitu luas area permukiman tertata (Ha) dibagi luas area permukiman keseluruhan (Ha).

Tabel 2.13 Pada Tahun 2022 Persentase Permukiman yang tertata sebesar 70,29% dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2021 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.470,68 Ha (69,96%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2020 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.467,15 Ha (69,80%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2019 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.460,61 Ha (69,46%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2018 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.457,11 Ha (69,32%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

C. Capaian Kinerja dan Analisis Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota

Urusan Wajib Dasar yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota

Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat, Kawasan permukiman dan pertanahan.

Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan meliputi : upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sebagian besar memiliki keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka bersifat lintas OPD yang tidak terlepas dari peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan instansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan dan keterkaitan proses perizinan, integrasi data base/informasi ketersediaan data, serta Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan, dengan program dan kegiatan :

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020) kegiatannya diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta fasilitasi Penanganan kasus konflik Perkara sengketa Pertanahan dengan kegiatan diantaranya :

- a. Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
- c. Kegiatan Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan
- d. Kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pada Tahun 2020 tidak terdapat kegiatan PTSL.

Pada tahun 2019 ditargetkan 1.000 persil lahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi memperoleh bantuan sertifikasi lahan/Tanah melalui sumber dana APBD Tahun 2019, masing-masing Penerima manfaat memperoleh Bantuan Rp. 250.000 Per Persil. Dengan mekanisme penerima manfaat sesuai data usulan dari Kelurahan yang telah diverifikasi yang selanjutnya proses penerbitan sertifikat lahan/tanah oleh kantor ATR/BPN dan terealisasi 801 Persil Tanah Masyarakat melalui kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Tahun 2019

- e. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan .

Pada tahun 2018-2020 penyelesaian konflik pertanahan saat ini kegiatan Pengaduan layanan masalah Pertanahan dalam memberikan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan kepada masyarakat, antara lain : berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik

SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (Tahun 2018-2020)

pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Dengan kegiatan antara lain::

- a. Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indikator dalam penyelesaian masalah tanah kosong./Pemanfaatan Tanah Kosong
 - b. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksisting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda.
 - c. Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang, namun dikarenakan anggaran yang tidak maksimal maka dialihkan/pergeseran pada APBDP tahun 2018 diprioritaskan pada penyediaan perangkat penunjang sehingga kegiatan penyediaan sistem data base tersebut diusulkan kembali pada tahun anggaran 2019..
 - d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
 - e. Peningkatan Aparatur Dalam Pengelolaan sistem Informasi Pertanahan.
- Adapun program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021-2022, dan capaian tahun 2022 sebagai berikut :
1. **Program Penelolaan Tanah Ulayat** (Tahun 2021) dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Kas Desa, target 100% realisasi 100% maka capaian 100%., dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sedagkan pada tahun 2022 program tersebut tidak dilaksanakan dan tidak masuk dalam Renja dan DPA Disperkimta Tahun 2022.
 2. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**, dengan Indikator Kinerja Program (outcoame) Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi target 100% realisasi 100% maka capaian 100%

3. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**, dengan indikator Kinerja Program (outcome) Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan, target 100% realisasi 50% maka capaian 50%.
4. **Program Penetapan Tanah Kosong** dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong, target 100% realisasi 100%.
5. **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**, dengan indikator Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara, target 100% realisasi 96,19% Dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, dengan realisasi PTSL tahun 2022 sejumlah 353 persil.
6. **Program Penatagunaan Tanah**, dengan indikator Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan, target 15,38% realisasi sebesar 15,38%, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun capaian kinerja IKK pada bidang pertanahan (tabel 2.14 dan 2.15) sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2022 Lahan Bersertifikat atau 62,82% (34.607,14 Ha) berdasarkan sumber Data BPN kota singkawang), sedangkan Tahun 2021 sebesar 56,61%. (28.273,72 Ha)..
 - Pada Tahun 2020 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun 2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan luas lahan bersertifikat 59,31% yaitu 26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha. Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota Singkawang).
 - Pada Tahun 2019 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang .Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun 2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan luas lahan bersertifikat 59,31% yaitu 26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha. Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota Singkawang).
2. Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi Mediasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan terkait Tapal Batas Singkawang – bengkayang diwilayah Kecamatan Singkawang Timur, serta batas Gerbang Timur, Utara dan Selatan, dengan realisasi (100%). Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/sengketa tanah antara lainnya sebagai berikut :
 - Mengumpulkan data/dokumen yuridis;
 - Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi

- pengaduan/ permasalahan, dokumentasi lokasi konflik/ sengketa;
- melaksanakan pengkajian atas laporan pengaduan konflik/ sengketa; dan
 - merekomendasikan penyelesaian masalah pertanahan.
- Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil berupa tanah eks. Polindes eks. Balai Desa yang merupakan aset Kelurahan Kecamatan Singkawang Utara dengan masyarakat setempat, dan pemilik sertifikat tersebut telah menghibahkan 2 (dua) bidang tanah eks Balai Desa dan Tanah eks Polindes untuk Pemerintah Kota Singkawang..Dalam penanganan masalah ini Bidang Pertanahan telah melakukan pengumpulan dokumen yuridis serta mengambil bukti fisik berupa penetapan titik koordinat, untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%.
- Pada tahun 2020 berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang tindih penguasaan oleh masyarakat setempat, selanjutnya menangani konflik Fasilitasi penyelesaian perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Singkawang selaku Jaksa Pengecara Negara, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
- Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan yang terdaftar dalam kasus Tanah Negara pada DISPERKIMTA khususnya menjadi tugas dan fungsi Bidang Pertanahan, dan masih dalam proses penyelesaian kasus, sengketa, perkara dan konflik Pertanahan dan kasus yang terdaftar tersebut telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
3. Capaian tahun 2022 terkait penyelesaian izin lokasi Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

Sedangkan tahun 2021 terkait Izin Lokasi (dimulai sejak Tahun 2020 pengajuan izin lokasi di Kota Singkawang telah melalui sistem OSS (Online Single Submission), sejak Tahun 2019 DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan (memfasilitasi Penyelesaian Izin Lokasi) DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan bagian dari Tim Teknis yang memberikan jawaban pertimbangan dan untuk melengkapi pertimbangan Teknis dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui Tim Teknis) dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti proses perizinannya, dan pada Tahun 2021 terkait penerbitan izin lokasi melalui Tata Ruang / BPN Kota Singkawang.

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja IKK pada Bidang Pertanahan tahun 2018- 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	KET
1	Luas Lahan Bersertifikat	%	59,31%	59.58%	61,26%	56,61%	62,92%	Sumber data dari ATR/BPN
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100 %	100%	100%	100%	100%	Lintas OPD
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100%	100%	100%	n/a	n/a	Lintas OPD, dan Tahun 2020 Merupakan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 2.15

Data pendukung Pelayanan Bidang Pertanahan s/d Tahun 2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	1.102 Persil	353 Persil
2.	Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan bantuan operasional	-	-	-	811 Persil	-	1.102 Persil	353 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil	-
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (fasilitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatan (TKD, Tanah Umum)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kec. Singkawang	5 Kec. Singkawang
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat/ .Kas Desa	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur	-
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan	1 kelurahan
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan	2 kelurahan
16	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar , Dan raperda IMTN		
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN	-
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	2	12	-	1
19.	Patok Tapal Batas/Tanda Batas Wilayah Administrasi Kota Singkawang - bengkayang (wilayah kec. singkawang Timur)							17 Patok
20.	Aplikasi SIPETA dan pemeliharaan							1 Aplikasi

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
2. Belum optimalnya fasilitas/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
3. Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM.
4. Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
5. Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
6. Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/peningkatan Infrastruktur Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta sinergi, integrasi dan keterpaduan dokumen RP3KP antar sektor/ lintas OPD.
7. Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer karena belum optimalnya Penyerahan Aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
8. Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
9. Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum tuntasnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang.
10. Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik dan berkelanjutan dan hingga terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
11. Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

12. Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
13. Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
14. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman serta permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga dapat memicu meluasnya permukiman kumuh.
15. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh, serta belum optimalnya fasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
16. Belum optimalnya Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
17. Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).
18. Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota

singkawang.

19. Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
20. Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
21. Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
22. Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/ keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
23. Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
24. Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
25. Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
26. Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
27. Belum optimalnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
28. Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
29. Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
30. Belum tersedianya regulasi/kebijakan Peraturan Daerah (perda/perwako) pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
31. Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
32. Belum optimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai

kewenangan pemerintah daerah.

33. Belum terlaksananya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
34. Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
35. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.
36. Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
37. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2023 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan tema : **“Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang di jabarkan Dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang RKPD 2023 adalah **“Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis SDA dan Peningkatan SDM Yang Berkualitas”**

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2023 ditetapkan dengan tema **“Pemulihan Ekonomi Yang Didukung Dengan Infrastruktur, Iklim Investasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**

➤ **Prioritas Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui

5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SD menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia :

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata

5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata
5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun tema pembangunan pada RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”**

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2023 ditetapkan dengan tema **“Pemulihan Ekonomi Yang Didukung Dengan Infrastruktur, Iklim Investasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**

Untuk mewujudkan kondisi yang disebutkan diatas maka dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RKPD Kota Singkawang dengan memperhatikan Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023 yang meliputi:

- a. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Strategis yang Berwawasan Lingkungan
- c. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Sektor Pertanian
- d. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan
- e. Peningkatan Pemanfaatandan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- g. Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel
- h. Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, serta RPK Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, serta RPK Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

I. Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- 3) Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
- 4) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
- 5) Peningkatan standarisasi dan promosi produk lokal
- 6) Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan
- 7) Pembinaan pelaku ekonomi kreatif
- 8) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 9) Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pertanian dan perikanan
- 10) Pengendalian pencemaran lingkungan
- 11) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata
- 12) Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- 13) Pengembangan sistem penyediaan air minum

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata diarahkan pada strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

- a. Meningkatkan akreditasi dan standarisasi Pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan profesional;
- b. Meningkatkan gizi ibu dan anak;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dari aspek peningkatan layanan kesehatan pembangunan diarahkan pada strategi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan.

3. Peningkatan Peran Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan

- a. Pembinaan olahragawan secara berkelanjutan;
- b. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
- c. Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan;

4. Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk;
- c. Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

5. Peningkatan Standarisasi Dan Promosi Produk Lokal

- a. Penataan Manajemen sistem perdagangan;
- b. Peningkatan Standarisasi dan Promosi Produk Lokal;

6. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Dan Jembatan

- a. Pengembangan dan peningkatan drainase;
 - b. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - c. Peningkatan sarana dan prasana kawasan permukiman dikawasan strategis;
 - d. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian banjir.
- 7. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif**
- a. Fasilitasi pemasaran produk ekonom kreatif;
 - b. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif.
- 8. Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- a. Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor;
 - b. Perluasan lapangan kerja;
 - c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja.
- 9. Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Produksi Pertanian Dan Perikanan**
- a. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektorpertanian dan Perikanan;
 - b. Penerapan teknologi inovatif dalam system budidaya dan pendekata nindeks pertanaman(IPPadi);
 - c. Penerapan teknologi inovatif didalam system budi daya;
 - d. Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pertanian dan perikanan.
- 10. Pengendalian Pencemaran Lingkungan**
- a. Pemberdayaan nmasyarakat dalam pengelolaan LH;
 - b. Optimalisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian pencemaran lingkungan;
 - d. Peningkatan kualitas tutupan lahan.
- 11. Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Wisata**
- a. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - b. Pengembangan destinas iwisata potensial yang bernilai jual;
 - c. Peningkatan promosi wisata berbasis TI.
- 12. Pembangunan Dan Peningkata Kualitas Rumah Tidak Layak Huni**
- a. Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
 - b. Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program;
 - c. Penataan lingkungan kawasan permukimankumuh;
 - d. Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi.
- 13. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
- a. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar;
 - b. Pengembangan system penyediaan air minum.

II. Program Prioritas

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan yang merata

Program Prioritas

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman
- 6) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

b) Peningkatan Derajat Kesehatan

Program Prioritas :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 5) Program Pengendalian Penduduk
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

c) Penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.

Program Prioritas

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 6) Program Pengelolaan Penerbangan
- 7) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 9) Program Penataan Bangunan Gedung
- 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

d) Pemulihan Ekonomi

Program Prioritas

- 1) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 2) Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
- 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- 4) Program Pengembangan UMKM
- 5) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 7) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 8) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 9) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
- 10) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 11) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 12) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 13) Program Promosi Penanaman Modal
- 14) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 15) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 16) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 17) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 18) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 19) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 20) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 21) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 22) Program Penyuluhan Pertanian
- 23) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 24) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 25) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 26) Program Pengelolaan Perikanan Budi daya
- 27) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 28) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 29) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
- 30) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 31) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 32) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 33) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 34) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 35) Program Pengembangan Ekspor
- 36) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 37) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- 38) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 39) Program Pemasaran Pariwisata
- 40) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

e) Pemantapan kinerja aparatur birokrasi

Program Prioritas

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 5) Program Administrasi Umum
- 6) Program Aplikasi Informatika
- 7) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 8) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 9) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 10) Program Pengelolaan Arsip
- 11) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 12) Program Pembinaan Perpustakaan
- 13) Program Kepegawaian Daerah
- 14) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 15) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 16) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 17) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 18) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 19) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 20) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 21) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 22) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 23) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 24) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 25) Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi

f) Pengembangan dan penataan kawasan

Program Prioritas

- 1) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 2) Program Pengembangan Permukiman
- 3) Program Pengembangan Perumahan
- 4) Program Kawasan Permukiman
- 5) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

g) Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

Program Prioritas

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 2) Program Penanganan Bencana
- 3) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- 4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- 9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 10) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 11) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 12) Program Pengelolaan Persampahan
- 13) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

h) Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan

Program Prioritas

- 1) Program Peningkatan Ketentramandan Ketertiban Umum
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 6) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- 7) Program Pemberdayaan Sosial
- 8) Program Rehabilitasi Sosial
- 9) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 10) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 11) Program Perlindungan Perempuan
- 12) Program Pemenuhan Hak Anak
- 13) Program Perlindungan Khusus Anak

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun Telaahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah bagi Dinas Perumahan kota Singkawang terkait pada prioritas sebagai berikut :

Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023 yaitu :

1) Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Dengan arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang :

1. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

- a. Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- b. Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program Pemerintah;
- c. Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh

Dengan Program Prioritas :

- a. Penyediaan Utilitas dan sarana prasarana publik
 - 1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- b. Pengembangan dan penataan kawasan
 - 1. Program Pengembangan Perumahan
 - 2. Program Kawasan Permukiman
 - 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 (dapat juga dilihat pada Lampiran Form T-C.31) sebagai berikut :

Tabel, 2.15 (Form Tabel T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.292.049.339					18.292.049.339	
	Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan					6.375.831.944					6.375.831.944	
1	1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.375.831.944	1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.375.831.944		
1	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, 1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87.849.400	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87.849.400		
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen	7.999.000	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen	7.999.000		
	2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.400	2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.400		
	3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.900	3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.900		
	4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.400	4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.400		
	5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.200	5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.200		

6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.001.400	6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.001.400
----	--	-------------	--	-----------	------------	----	--	-------------	--	-----------	------------

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)		Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	8 Laporan	40.001.400			Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	8 Laporan	40.001.400	
7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.850.100	7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.850.100
	Laporan LAKIP/LKT		- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	5.850.100			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	5.850.100	
	Laporan PMPRB		- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional		Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Standar Kompetensi Jabatan		Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Inovasi Daerah		- Jumlah Laporan Inovasi Daeah	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan Inovasi Daeah	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Penyusunan SOP		Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Laporan				Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Laporan		
2	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.912.824.983	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.912.824.983

1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	323.938.700	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	323.938.700
	Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)		Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)					Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	0	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.002.000	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.002.000	
4)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.999.600	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.999.600	
5)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.500.100	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.500.100	
6)	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan tanggapan/tindaklanjuti Rekomendasi Temuan	1 Laporan	5.000.200	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan tanggapan/tindaklanjuti Rekomendasi Temuan	1 Laporan	5.000.200	
7)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0	7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	31.194.100	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	31.194.100	

	Sub Kegiatan Penyusunan 1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.999.000	Sub Kegiatan Penyusunan 1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.999.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan 2) Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	19.000.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan 2) Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	19.000.300	
		DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	1 Laporan			DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	1 Laporan		
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.500	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.500	
	Sub Kegiatan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.998.300	Sub Kegiatan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.998.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	250.000.000	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	4 Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	250.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	150.000.000	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	100.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	100.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	100%	746.610.880	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	1	746.610.880	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.786.180	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.786.180	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	2) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	174.458.100	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	2) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	174.458.100	
		DISPERKIMTA	Cakupan Peralatan dan - Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	174.458.100		DISPERKIMTA	Cakupan Peralatan dan - Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	174.458.100	
	ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	74.458.100	ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	74.458.100	
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	43.838.600	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	43.838.600	
	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.717.100	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.717.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	8.811.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	8.811.000	
	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	
	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.400	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.999.500	8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.999.500	
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0	
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	0	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	847.913.743	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	847.913.743	
	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.046.400	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.046.400	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.482.663	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.482.663	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.384.680	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.384.680	
			Cakupan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	575.384.680			Cakupan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	575.384.680	
	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	
	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	1 Paket	100.729.000	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	1 Paket	100.729.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	499.438.838	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	499.438.838	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.814.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.814.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273.894.612	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273.894.612	
			Cakupan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	273.894.612			Cakupan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	273.894.612	
	- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	
	- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.340.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.340.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikator (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	79 Unit	54.389.826	4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	79 Unit	54.389.826	
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				5.867.409.300					5.867.409.300	
1.	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	100%	415.237.900	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	100%	415.237.900	
	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	60.273.900	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	60.273.900	
	1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah			1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	0%	0	
	2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan			2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan	0%	0	
	3) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			3) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0%	0	
	4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5)	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah dokumen pendataan 1) Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	60.273.900	5) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah dokumen pendataan 1) Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	60.273.900		
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	354.964.000	2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	354.964.000		
1)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	Jumlah rumah Korban bencana 1) yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	6 Unit	89.915.300	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	Jumlah rumah Korban bencana 1) yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	6 Unit	89.915.300		
2)	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.269.600	2) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.269.600		
4)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	1Unit	154.779.100	4) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	1Unit	154.779.100		
2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	15%	5.452.171.400	2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	15%	5.452.171.400	
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	100%	5.452.171.400	1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	100%	5.452.171.400	
1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	117.620.400	1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	117.620.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikator (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	33 lokasi	5.212.583.200	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	33 lokasi	5.212.583.200	
*	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	100%	0	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	100%	0	
-	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	4.800/16 Paket	0	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	4.800/16 Paket	0	
		Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan - Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	9 Lokasi/paket	0		Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan - Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	9 Lokasi/paket	0	
-	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	1.000 M/ 6 Paket	0	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	1.000 M/ 6 Paket	0	
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10.011.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10.011.800	
4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	111.956.000	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	111.956.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				2.969.090.170					2.969.090.170	
2.	1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	47,74%	2.398.159.320	1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	47,74%	2.398.159.320	
			Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25,0%	248.115.100			Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25%	248.115.100	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang 1. Ditingkatkan infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2.398.159.320	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang 1. Ditingkatkan infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2.398.159.320	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) danDetail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	294.395.100	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) danDetail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	294.395.100	
	2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit	248.115.100	2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit	248.115.100	
	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	96.542.200	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	96.542.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4) Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0%		4) Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0%	0	
	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	2 Ha	1.759.106.920	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	2 Ha	1.759.106.920	
	6) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0		6) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0%	0	
2.	2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	2.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	570.930.850	2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	2.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	570.930.850	
			2.2 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,50%	570.930.850			2.2 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,50%	570.930.850	
	1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	570.930.850	1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	570.930.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 1) Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit/KK	570.930.850	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 1) Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit/KK	570.930.850	
2)	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)			Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2)	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)	0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN													
BIDANG PERTANAHAN					3.079.717.925					3.079.717.925			
1	1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	
	1)	Sub Kegiatan I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1)	Sub Kegiatan I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0	
	2)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Berita Acara	59.589.200	2)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Berita Acara	59.589.200	
2	2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian 1 Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian 1 Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	1,00	2.056.916.800	
		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah 1 Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah 1 Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	
	1)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0	0	1)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0,00	0	
			KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota	0	0		KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota	0,00	0		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi	0			KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi	0,00	0	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1)	3 dokumen	2.056.916.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1)	3 dokumen	2.056.916.800	
3	PENGLOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan 1	100%	8.185.900	PENGLOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan 1	100%	8.185.900	
1	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Inventarisasi/terdata 1 dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	8.185.900	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Inventarisasi/terdata 1 dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	8.185.900	
1)	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 1)	1 Dokumen	8.185.900	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 1)	1 Dokumen	8.185.900	
			Jumlah Draft Peraturan - (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen Naskah Akademik	8.185.900			Jumlah Draft Peraturan - (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen Naskah Akademik	8.185.900	
4	PENGLOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) 1	100%	52.667.950	PENGLOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) 1	100%	52.667.950	
1	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara 1	100%	75.068.143	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara 1	100%	75.068.143	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1)	1 Dokumen	38.936.825	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah. 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1)	1 Dokumen	38.936.825	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	13.731.125	1) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	13.731.125	
5	5 PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	34,61%	902.358.075	1 PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	34,61%	902.358.075	
1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan 1 Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	1.659.500.000	1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan 1 Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	1.659.500.000	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	506.867.500	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	506.867.500	
2)	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	395.490.575	1) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	395.490.575	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			JUMLAH		18.292.049.339			JUMLAH		18.292.049.339	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah Merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses Perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan Proses bottom Up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga peyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penjangkauan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD (Pokok-pokok Pikiran) yang kemudian di sinkronisasikan, diverifikasi dan dimasukkan kedalam program kegiatan dan di lakukan entry kedalam sistem aplikasi SIPD dan dapat juga dilihat pada (tabel 2.16 Form T-C-32) dengan program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan kegiatan:

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, yaitu Pembangunan/Peningkatan Jalan Di Lingkungan perumahan, Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Drainase Di Lingkungan Perumahan. dengan Lokasi tersebar di 5 kecamatan.

2. **Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh :**

a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dana dari DAK Bidang Perumahan Permukiman serta DAU-APBD Kota Singkawang yang merupakan Bantuan sosial dengan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lokasi tersebar di 5 kecamatan di Kota Singkawang.

b. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

c. Sub kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Berupa sarana dan Pasarana Infrastruktur lingkungan Perumahan Permukiman yaitu Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Prasarana Sarana Dasar (PSD) dalam rangka Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yaitu pekerjaan : Pembangunan / Peningkatan Jalan lingkungan perumahan permukiman dan Pembangunan / Peningkatan saluran Drainase lingkungan perumahan permukiman.

Tabel 2.16 (Form Tabel T-C.32.)

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
A. Bidang Perumahan Rakyat					
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1 Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	55,47%	
	1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1 Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi.Paket	
		1 Jl. Muin Achmad Gg. Tawank Asri, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		2 Jl. Cisdane jalur VIII Rt. 39/ Rw.12, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		3 Jl. Rambutan, Perum, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		4 Jalan Semai Gang Panji Blok D, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		5 Jalan Jambu RT 060 Perumnas, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		6 Jl. Nyiur Gading BTN Kowina Indah Blok D Rt. 014/ Rw. 004, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		7 Jalan Terminal Induk Gang Kowina, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Jalan
		8 Jl. Simalar Rt.09/ Rw.03, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		9 Gang Kibli, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		10 Jl. Rawasari Gg. Slamet, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		11 Jl. Rawasari Gg. Margasari 2, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		12 RT 05 menuju RT 06 RW 04, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		13 RT 01 RW 01, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran

		14 RT 45 RW 007, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran
		15 Jalan Teluk Danau RT 26, Kota Singkawang	Pembangunan dan Peningkatan Saluran	1 Paket	Pembangunan dan Peningkatan Saluran

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2024

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
I.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangandan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi Kreatif dan digital
II.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulandaerah2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kewilayah yang belum berkembang3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta Ketahanan bencana dan perubahan iklim
III.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda6. Pengentasan kemiskinan7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
IV.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan3. Moderasi beragama4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
V.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 2. Pembangunan konektivitas multi moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan 4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan 5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim 3. Pembangunan rendah karbon
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas 2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan 3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber 4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi 5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap

perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

- ***Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan***

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Adapun Agenda pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024 yang menjadi Telaahan dan dipedomani sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Tabel (3.1) sebagai berikut :

Agenda Pembangunan Yaitu :

1. ***Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.***

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Infrastruktur pelayanan dasar,dengan kegiatan prioritas,yaitu
 - 1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- b. Infrastruktur ekonomi,dengan kegiatan prioritas,yaitu
 - 1) konektivitas jalan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RD Periode 2023-2026. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dan berfokus pada Sasaran Pembangunan Daerah serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi dan Kebijakan.

Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target Kinerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Arah Tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta memperhatikan Kesesuaian dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 3.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG **Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
		Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai
		Peningkatan pengelolaan sanitasi
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

Tabel 3.3

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPD TAHUN 2023-2026
Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 4 Tahun mendatang mengacu pada RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2018-2022, serta dengan memperhatikan RKPD tahun berkenaan adalah (Tabel 3.3) .

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

Tujuan ke - 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Sasaran ke- 2 : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Sasaran ke- 4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

1. Bidang Perumahan Rakyat

- Tujuan :

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Indikator tujuan : Persentase penanganan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah.

- Sasaran :

1) Meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah

- Indikator Sasaran :

- Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah yang ditangani

2. Bidang Kawasan Permukiman

- Tujuan :

Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

1. Indikator tujuan 1 :Persentase Pencegahan luas Area kawasan Permukiman berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha
 2. Indikator tujuan 2 :Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha
 3. Indikator tujuan 3 :Persentase penurunan luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha
- Sasaran :
 - 1) Sasaran 1 : Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di bawah 10 Ha
 - Indikator sasaran 1 : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.
 - 2) Sasaran 2 :Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha
 - Indikator Sasaran 2 : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.
 - 3) Sasaran 2 : Menurunnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha
 - Indikator Sasaran 3 : Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha. Yang ditangani

3. Bidang Pertanahan

- Tujuan :
 - Meningkatnya kualitas pentaan ruang dan penataan bangunan.
- Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan
- Sasaran :
 - Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.
- Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

4. SekretariatDinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

- Tujuan :
 - Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Indikator Tujuan :
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan kesekretariatan Disperkimta.
 - 2) Capaian PMPRB dan SAKIP Dinas Perkimta
- Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.
Indikator Sasaran :
 - 2) Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Indikator Sasaran :

- 1) Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.
- 2) Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumendi dari suatu kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah, selanjutnya program kegiatan haruslah memiliki suatu alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan yang disebut Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana RKPD Tahun anggaran 2023. Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk tahun anggaran 2023 dengan Program dan prioritas Kegiatan dapat juga dilihat pada (lampiran Tabel 3.1): sebagai berikut :

➤ Program Prioritas

Program dan kegiatan prioritas sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 12 (tiga belas) program prioritas dapat juga dilihat pada (Lampiran) program kegiatan prioritas yaitu ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani, target 100%.
- 2 Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, target 50%

Program ini dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.

- Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
 - Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

3. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- Indikator kinerja Outcome ;

1. Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU), target 78,52%.

2. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara, target 15%.

Program Pengembangan Perumahan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.

3. Program Kawasan Permukiman.

- Indikator kinerja Outcome;
- 1 Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Target 47,58%
- 2 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 25%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
2. Kegiatan Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh.
 - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- Indikator kinerja Outcome;

1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani, Target 12,50%
2. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 12,50%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha .

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Indikator kinerja Outcome ;
- 1. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota..
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota..

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan

- Indikator kinerja Outcome ;
- 1. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan Target 100%.

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Indikator kinerja Outcome ;

Persentase terinventarisasi dan Termanfaatkannya Tanah Kosong Target 100%

Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

- Sub Kegiatan Pelaksanan Inventarisasi Tanah Kosong

8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN),target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan I Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
- Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

9. Program Penatagunaan Tanah

Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan target 34,61%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

➤ Program Penunjang/Pendukung

Program Penunjang/pendukung (supporting program) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, terdiri dari 1 (satu) program penunjang yaitu;

1, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerahtarget 100%

Program ini meliputi Kegiatan dan sub Kegiatan;

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap usulan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Tahun 2023 dan tetap merujuk pada target RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RKPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023 ini, maka disusun beberapa Program terkait penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan. Ada 10 Program, 18 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 18.292.049.339,- sebagaimana tabel 4.1 (Form Tabel T-C.33.) sebagai berikut :

Tabel 4.1 (Form Tabel T-C.33.)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan) dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	04.						14.912.331.414	14.912.331.414	15.212.331.414			31.915.324.085		
1.	04.	01		1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelaksanaan 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	6.075.831.944	6.075.831.944	6.375.831.944		100%	7.161.999.999
1.	04.	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	67.847.900	67.847.900	87.849.400	APBD	100%	58.000.000
1.	04.	01	2.01	01) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	DISPERKIMTA	2 Dokumen	2 Dokumen	7.999.000	7.999.000	7.999.000	APBD	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	8.000.000
1.	04.	01	2.01	02) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.400	4.998.400	4.998.400	APBD	1 Dokumen RKA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	03) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.900	4.998.900	4.998.900	APBD	1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	04) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.001.400	5.001.400	5.001.400	APBD	1 Dokumen DPA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	05) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.200	5.000.200	5.000.200	APBD	1 Dokumen Perubahan DPA	5.000.000

1.	04.	01	2.01	06	6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DISPERKIMTA	5 Laporan	8 Laporan	19.999.900	19.999.900	40.001.400	APBD	5 Laporan	20.000.000
----	-----	----	------	----	----	--	---	-------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------	-----------	------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan				Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, - Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)		5 Laporan	8 Laporan	19.999.900	19.999.900	40.001.400	APBD		5 Laporan	20.000.000				
1.	04.	01	2.01	07	7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Laporan	6 Laporan	19.850.100	19.850.100	19.850.100	APBD	5 Laporan	10.000.000
	- Laporan LAKIP/LKT	- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	5.850.100	5.850.100	5.850.100	APBD		1 Laporan	2.000.000				
	- Laporan PMPRB	- Jumlah Laporan PMPRB	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	2.000.000				
	- Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	- Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	2.000.000				
	- Laporan Standar Kompetensi Jabatan	- Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	2.000.000				
	- Laporan Inovasi Daerah	- Jumlah Laporan Inovasi Daerah	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	2.000.000				
	- Laporan Penyusunan SOP	- Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	DISPERKIMTA		1 Laporan			3.500.000	APBD		-	-				
1.	04.	01	2.02	2	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	3.932.826.483	3.932.826.483	3.912.824.983		100%	4.491.684.703

1.	04.	01	2.02	01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	36 Orang/12 Bulan	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383	3.561.384.383	3.561.384.383	APBD		36 Orang/12 Bulan	4.099.197.459
1.	04.	01	2.02	02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	12 Dokumen	12 Dokumen	323.938.700	323.938.700	323.938.700	APBD		1 Dokumen	344.987.244
					Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan - Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan - (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)		100%	100%	323.938.700	323.938.700	323.938.700	APBD		1 Dokumen	344.987.244
1.	04.	01	2.02	03	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan 1) dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	6.002.000	6.002.000	6.002.000	APBD		1 Dokumen	6.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			13	
APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana											
1.	04.	01	2.02	04	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.600	5.999.600	5.999.600	APBD		1 Dokumen	6.000.000
1.	04.	01	2.02	05	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.100	10.500.100	10.500.100	APBD		1 Laporan	10.500.000
1.	04.	01	2.02	06	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan 1) tanggapan/tindaklanjut Rekomendasi Temuan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	5.000.200	5.000.200	5.000.200	APBD		1 Laporan	5.000.000
1.	04.	01	2.02	07	7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISPERKIMTA	4 Laporan	0	20.001.500	20.001.500	0	APBD		2 Laporan	20.000.000

1.	04.	01	2.03		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	31.194.100	31.194.100	31.194.100			100%	15.700.000
1.	04.	01	2.03	01		Sub Kegiatan Penyusunan 1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.000	3.999.000	3.999.000	APBD		1 Dokumen	4.000.000
1.	04.	01	2.03	03		2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	2 Laporan	2 Laporan	19.000.300	19.000.300	19.000.300	APBD		1 Laporan	3.500.000
								Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan						1 Laporan	3.500.000
1.	04.	01	2.03	05		3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.196.500	4.196.500	4.196.500	APBD		12 Laporan	4.200.000
1.	04.	01	2.03	06		4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.998.300	3.998.300	3.998.300	APBD		1 Laporan	4.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.05	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%		0	250.000.000			100%	285.000.000
1.04.01.2.05.02	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISPERKIMTA		4 Paket		0	150.000.000	APBD			175.000.000
1.04.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISPERKIMTA		56 Orang		0	100.000.000	APBD		56 Orang	110.000.000
1.04.01.2.06	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	DISPERKIMTA	100%	100%	696.610.880	696.610.880	746.610.880			100%	711.570.829
1.04.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	28.786.180	28.786.180	28.786.180	APBD		1 Paket	30.226.691
1.04.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DISPERKIMTA	2 Paket	2 Paket	174.458.100	174.458.100	174.458.100	APBD		2 Paket	183.158.981
		Cakupan Peralatan dan # Perlengkapan Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	100%	100%	174.458.100	174.458.100	174.458.100	APBD		100%	183.158.981
		- ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	74.458.100	74.458.100	74.458.100	APBD		1 Paket	78.158.981
		- Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD		1 Paket	105.000.000
1.04.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	43.838.600	43.838.600	43.838.600	APBD		1 Paket	46.030.698
1.04.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	32.717.100	32.717.100	32.717.100	APBD		1 Paket	34.353.459
1.04.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	8.811.000	8.811.000	8.811.000	APBD		1 Dokumen	9.801.000
1.04.01.2.06.09	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	450.000.000	APBD		12 Laporan	400.000.000

1.	04.	01	2.06	10	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.400	4.000.400	4.000.400	APBD		1 Dokumen	4.000.000
1.	04.	01	2.06	11	8) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.500	3.999.500	3.999.500	APBD		1 Dokumen	4.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	847.913.743	847.913.743	847.913.743			1 Paket	841.748.645				
1.	04.	01	2.08	01	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.046.400	4.046.400	4.046.400	APBD		12 Laporan	4.253.004
1.	04.	01	2.08	02	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	268.482.663	268.482.663	268.482.663	APBD		12 Laporan	281.906.576
1.	04.	01	2.08	04	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1) Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	575.384.680	575.384.680	575.384.680	APBD		12 Laporan	555.589.065
					Cakupan Penyediaan Jasa # Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			100%	100%	575.384.680	575.384.680	575.384.680	APBD		100%	555.589.065
					- PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	DISPERKIMTA	16 Orang/12 Bulan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	474.655.680	474.655.680	APBD		16 Orang/12 Bulan	474.522.240
					- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Jumlah Paket Makanan dan - Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	100.729.000	100.729.000	100.729.000	APBD		1 Paket/12 Bulan	81.066.825

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	499.438.838	499.438.838	499.438.838	APBD		1 Paket	758.295.822
1.04.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISPERKIMTA	1 Unit	1 Unit	61.814.400	61.814.400	61.814.400	APBD		1 Unit	50.000.000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISPERKIMTA	4 Unit	4 Unit	273.894.612	273.894.612	273.894.612	APBD		4 Unit	287.587.125
		Cakupan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100%	100%	273.894.612	273.894.612	273.894.612	APBD		100%	287.587.125
	- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		4 unit /12 Bulan (48 Kali)	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	261.594.612	261.594.612	APBD		4 unit /12 Bulan (48 Kali)	282.074.625
	- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya		4 unit (Kendaraan Roda Empat)	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	12.300.000	12.300.000	APBD		4 unit (Kendaraan Roda Empat)	5.512.500
1.04.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISPERKIMTA	1 Unit	1 Unit	109.340.000	109.340.000	109.340.000	APBD		1 Unit	363.599.197
1.04.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	DISPERKIMTA	80 Unit	79 Unit	54.389.826	54.389.826	54.389.826	APBD		80 Unit	57.109.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					5.867.409.300	5.867.409.300	5.867.409.300				9.595.400.000	
1.04.02.	1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.1	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	415.237.900	415.237.900	415.237.900	APBD	100%	648.000.000
			1.2	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	KOTA SINGKAWANG	50%	50%	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD	0%	0
1.04.02.2.01	1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD	0	0
1.04.02.2.01.01	1)	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1)	Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0
1.04.02.2.01.02	2)	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1)	Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0
1.04.02.2.01.04	3)	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1)	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0
	05	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena	1)	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0
1.04.02.2.01.06	5)	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1)	Jumlah dokumen pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04.02.2.03	2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	354.964.000	354.964.000	354.964.000	APBD	100%	628.000.000
1.04.02.2.03.01	1)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1)	Jumlah rumah Korban bencana yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	KOTA SINGKAWANG	6 Unit	6 Unit	89.915.300	89.915.300	89.915.300	APBD	6 Unit Rumah	210.000.000
1.04.02.2.03.02	2)	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1)	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	110.269.600	110.269.600	110.269.600	APBD	1 Dokumen	110.000.000
1.04.02.2.03.05	3)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1)	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	1Unit	1Unit	154.779.100	154.779.100	154.779.100	APBD	3 Unit	308.000.000
1.04.02.2.06	3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG							100%	20.000.000
1.04.02.2.06.03	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KOTA SINGKAWANG							1 Laporan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04.04	2. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.2 Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	15%		5.452.171.400	5.452.171.400	5.452.171.400			55,47%	8.947.400.000	
1.04.04.2.01	1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	100%		5.452.171.400	5.452.171.400	5.452.171.400	APBD		100%	8.947.400.000	
1.04.04.2.01.01	1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	117.620.400	117.620.400	117.620.400	APBD		1 Dokumen	132.000.000	
	Inventarisasi /Pendataan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan PSU Perumahan (1 Dokumen), Jumlah - Dokumen Update Pendataan Perumahan dan Backlog Perumahan (1 Dokumen)	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	117.620.400	117.620.400	117.620.400	APBD				
1.04.04.2.01.02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	33 lokasi	33 lokasi	5.212.583.200	5.212.583.200	5.212.583.200	APBD		20 Lokasi/Paket	8.470.000.000	
	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU * lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang terfasilitasi PSU	KOTA SINGKAWANG	100%					APBD		100%	8.470.000.000	
	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan * Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	4.800/16 Paket					APBD		35 Lokasi/Paket	8.470.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	Kota Singkawang	9 Lokasi/paket					APBD			4.308.349.649
	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	Kota Singkawang	600 M ³ /3 paket					APBD			4.161.650.351
1.	04. 04 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	10.011.800	10.011.800	10.011.800	APBD		1 Laporan	22.000.000
1.	04. 04 2.01 05	Sub Kegiatan Verifikasi dan 4) Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	111.956.000	111.956.000	111.956.000	APBD		1 Laporan	323.400.000
1.	04.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					2.969.090.170	2.969.090.170	2.969.090.170				15.157.924.086		
1	04	03	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.1	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	KOTA SINGKAWANG	47,74%	47,74%	2.590.300.345	2.398.159.320	2.398.159.320		65,14%	3.907.924.086
				1.2	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha		25%	25%	440.256.125	248.115.100	248.115.100		50%	1.500.000.000
1	04	03	2.03	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	2 Ha	2 Ha	2.590.300.345	2.398.159.320	2.398.159.320	APBD	2 Ha	3.907.924.086
1	04	03	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	4 Dokumen	4 Dokumen	294.395.100	294.395.100	294.395.100	APBD	3 Dokumen	300.000.000
1	04	03	2.03	02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Singkawang	8 Unit	8 Unit	440.256.125	248.115.100	248.115.100	DAU	12 Unit	450.000.000
1	04	03	2.03	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 3) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1 Laporan	1 Laporan	96.542.200	96.542.200	96.542.200	APBD	1 Laporan	100.000.000

1	04	03	2.03	05	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara 4) Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa 1) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang				0	0	0	APBD		1 Laporan	150.000.000
1	04	03	2.03	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan 5) Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	Kota Singkawang	2 Ha	2 Ha	1.759.106.920	1.759.106.920	1.759.106.920		APBD		2 Ha	1.807.924.086
1	04	03	2.03	08	6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi	Kota Singkawang										1.050.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	04	03	2.03	07	Sub Kegiatan Pendataan dan 7) Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data 1) Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Singkawang			0	0	0	APBD		1 Dokumen	50.000.000

						Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (DAU)	Kota Singkawang	8 Unit / KK				DAU			
1	04	04	2.01	03	2) Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	1) Jumlah Dokumen Data penerima bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Kota Singkawang								150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.	10.							1.606.717.925	1.606.717.925	3.079.717.925			6.624.380.000		
								1.606.717.925	1.606.717.925	3.079.717.925			6.624.380.000		
2	10	04		2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1 Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	59.589.200	59.589.200	59.589.200	APBD	100%	150.000.000
2	10	04	2.01		1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	1 Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	59.589.200	59.589.200	59.589.200	APBD	100%	150.000.000
2	10	04	2.01	01	Sub Kegiatan I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan 1) Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG			0	0	0		1 Dokumen	40.000.000
2	10	04	2.01	02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen Berita Acara	1 Dokumen Berita Acara	59.589.200	59.589.200	59.589.200	APBD	1 Dokumen/Berita Acara	110.000.000

2	10	05			3	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	603.916.800	603.916.800	2.056.916.800	APBD		100%	4.120.000.000
2	10	05	2.01			Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 1 untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	603.916.800	603.916.800	2.056.916.800	APBD		100%	4.120.000.000
2	10	05	2.01	01	1)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	KOTA SINGKAWANG						APBD		2 Dokumen	80.000.000
								SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota	KOTA SINGKAWANG						APBD		1 Dokumen	30.000.000
								SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi	KOTA SINGKAWANG						APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	10	05	2.01	02	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	3 dokumen	603.916.800	603.916.800	2.056.916.800	APBD		5 Dokumen	4.040.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif							
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan				Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2	10	07			5	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	KOTA SINGKAWANG								100%	220.000.000
2	10	07	2.01			Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat 1 yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang	KOTA SINGKAWANG								100%	220.000.000
2	10	07	2.01	01	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG								7 Laporan	220.000.000

2	10	08			6 PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1 Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	8.185.900	8.185.900	8.185.900	APBD		100%	153.000.000
2	10	08	2.01		1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1 Cakupan Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG								100%	63.000.000
2	10	08	2.01	01	1) Sub Kegiatan Kooordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1) Jumlah Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG								10 Laporan	63.000.000
2	10	08	2.02		1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	8.185.900	8.185.900	8.185.900	APBD		100%	90.000.000
2	10	08	2.02	02	1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	8.185.900	8.185.900	8.185.900	APBD		1 Dokumen	90.000.000
						Jumlah Draft Peraturan - (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun		1 Dokumen Naskah Akademik	1 Dokumen Naskah Akademik	8.185.900	8.185.900	8.185.900	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	10	09			7 PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1 Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	32.667.950	32.667.950	52.667.950	APBD		100%	451.380.000
2	10	09	2.01		1 Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1 Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	32.667.950	32.667.950	52.667.950	APBD		100%	451.380.000

2	10	09	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1)	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	18.936.825	18.936.825	38.936.825	APBD	1 Dokumen	215.000.000
2	10	09	2.01	02	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	13.731.125	13.731.125	13.731.125	APBD	1 Dokumen	236.380.000
2	10	10			8 PENATAGUNAAN TANAH	1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	KOTA SINGKAWANG	34,61%	34,61%	902.358.075	902.358.075	902.358.075		12%	1.530.000.000
2	10	10	2.01		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	902.358.075	902.358.075	902.358.075	APBD	100%	1.530.000.000
2	10	10	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 1)	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	506.867.500	506.867.500	506.867.500	APBD	5 laporan/ Dokumen	105.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan				Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	10	10	2.01	02	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan 1) Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	395.490.575	395.490.575	395.490.575	APBD	5 Dokumen	1.350.000.000
2	10	10	2.01	03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1)	KOTA SINGKAWANG	0	0	0	0	0	APBD	1 Dokumen	75.000.000
			JUMLAH							16.519.049.339	16.519.049.339	18.292.049.339			38.539.704.085

BAB V

PENUTUP

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor. Keluarannya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan perekonomian. Perumahan dan permukiman sangat berkaitan erat dengan sektor pembangunan yang lain sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan paling tidak berkaitan dengan dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat di manapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan sarana lingkungan perumahan permukiman/ Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke 1 untuk periode Renstra 2023-2026. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, Disamping itu, Rencana Kerja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2023, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RKPd Kota Singkawang Tahun 2023.

Yang menjadi catatan penting adalah pada Dokumen Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan dalam rancangan awal Renja Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Tahun 2023 terdapat program dan kegiatan khususnya di bidang pertanahan yang tidak dapat di akomodir pada aplikasi SIPD sehingga program kegiatan tersebut tidak dapat di input ke dalam sistem aplikasi SIPD yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan

Indikator kinerja Outcome ;

1 Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara target 100 %

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

2. Program Penanganan Konflik, sengketa dan Perkara Pertanahan

Indikator kinerja Outcome ;

1. Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan, target 100 %

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan

Adapun beberapa Target Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target indikator Kineja Utama (IKU) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :

1. Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah(%) Target 100%
2. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani, Target 47,74%
3. Persentase (Fasilitasi) Penyelesaian Konflik Pertanahan, Target 100%
4. Capaian PMPRB, Target BB
5. Capaian SAKIP, Target BB

Target indikator Kineja Program (Outcome) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :

1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, target 100%
2. Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, target 50%
3. Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU), target 78,52%
4. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara, target 25%
5. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 47,74%
6. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 25%
7. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, target 2,815%

8. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 2,815%
9. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani, target 100%
10. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan, target 100%
11. Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, target 100%
12. Persentase terinventarisasi dan Termanfaatkannya Tanah Kosong, target 100%
13. Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), target 100%
14. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan, target 34,61%

Untuk dapat mewujudkan target capaian kinerja tersebut, Oleh karena itu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah serta dapat melaksanakan program-program prioritas dengan maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik utamanya Pelayanan Dasar secara optimal kepada masyarakat.

Dengan dijabarkannya Renja ini, merupakan penjabaran Operasional Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran 2023 Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang menjadi tugas dan fungsi Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman, serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Bidang Pertanahan.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran 2023. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Singkawang, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	04.									
1.	04.	01.								
1.	04.	01.	2.01							
			01							
			02							
			03							
			04							

				05	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1) Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun 1) 1 Dokumen	5	Dokumen	-	-	-	-	1	1	20,00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2	8	Dokumen	-	-	-	-	2	2	25,00
1.	04.	01.	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1) SKPD (1 Dokumen)	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	4	Laporan					1	1	25,00
						Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	4	Laporan					1	1	25,00
				05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan					12	12	25,00
				06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan					1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah						
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)					
1.	04.	01.	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
			01		Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1) Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	1	1	25,00

				02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	-	-	-	-	2	2	25,00
						2) Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	400	%					100	100	25,00
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	-	-	-	-	1	1	25,00
				05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	1	1	25,00
				06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				09	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
				10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah					
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)				
1.	04.	01.	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400	%	-	-	-	-	100	50	12,50
			01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00

				02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1)	48	Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	-	-	-	-	12	12	25,00
						- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	400	%					100	100	25,00
1.	04.	01.	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1)	1	Unit/12 bulan	-	-	-	-	1	1	100,00
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1)	19	Unit	-	-	-	-	4	4	21,05
				09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit					1	1	25,00
				10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	320	Unit					80	80	25,00
1.	04				URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
					BIDANG PERUMAHAN RAKYAT										
1.	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
						Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	100	%					50	50	50,00
1.	04.	02	2.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				06	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1 04 02 2 03.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.	400 %	-	-	-	-	100	100	25,00
1 04 02 2 03. 01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	24 Unit Rumah	-	-	-	-	6	6	25,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1)	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 1)	24 Unit Rumah	-	-	-	-	2	2	8,33
1. 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum (PSU) 1.	79,27 %	-	-	-	-	78,52	78,52	99,05
		Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang 2.	60 %	-	-	-	-	15,00	15,00	25,00
1. 04. 05 2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan 1).	400 %	-	-	-	-	100,00	100	25,00
	01 Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
	02 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 1)	80 Lokasi/Paket	-	-	-	-	33	33	41,25
	03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan 1)	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00
	05 Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1)	4 Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah				
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)			
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN												
1.	04.	03											
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
		1	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	67,31 %	-	-	-	15,08	15,08	22,40			
		2	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	92,25 %	-	-	-	25,00	25,00	27,10			
1.	04.	03	2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Peremukimannya	8,63 Ha	-	-	-	2	2,00	23,17
					2.	Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	400 %	-	-	-	100	50,00	12,50
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) danDetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	12 Dokumen	-	-	-	4	4	33
			02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	80 Unit	-	-	-	17	17	21,25
					*	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)	80 Unit/KK	-	-	-	17	17	21,25
					-	Jumlah Fasilitas/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	4 Dokumen/Kegiatan	-	-	-	1	1	25,00
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	20 Unit				17	17	85,00
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAK)	60 Unit				0	0	0,00

				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00
--	--	--	--	----	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	-------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah							
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)						
	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/ Dipugar		8,94	Ha	-	-	-	-	2	2	22,37			
1.	04.	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani		80	%	-	-	-	-	20,00	20,00	25,00	
				2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni		0,04	%	-	-	-	-	1,57	1,57	3925,00	
1.	04.	04	2.03		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	20	Ha	-	-	-	-	5	5	25
				01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1).	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	99	Unit	-	-	-	-	18	18	18,18
						*	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK+DAU)	880	Unit	-	-	-	-	18	18	2,05
						-	Jumlah Fasilitas/Monitoring dan BOP Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
						-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	32	Unit					1	1	3,13

						Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan - Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota)	1	Dokumen	-	-	-	-	1	1,00	100,00
						Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai - Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	1	1,00	100,00
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan	400	%	-	-	-	-	100,00	100	25,00
2	10	08	202		Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1. Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	4	Dokumen	0	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah						
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)					
		Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako) - Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1	Dokumen				1	1	100,00					
		Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam - keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	0	-	-	1	1	33,33					
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	400	%	-	-	-	-	100,00	100	25,00
2	10	09	201		Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1) Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	400	%	-	-	-	-	100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4	Dokumen					4	4,00	100,00
						Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan (- Pendataan PTSL)	4	Dokumen					1	1,00	25,00
						- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan	4	Dokumen					-	0,00	0,00
				02	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian 1) Pemanfaatan Tanah Negara	4	Dokumen					1	1,00	25

						Jumlah Dokumen Database SKT/SPT yang terinput pada Aplikasi SIPETA	1	Dokumen					1	1,00	100
						Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)	3.260	Persil					0	0,00	0
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	400	%	-				100,00	100,00	25,00
2	10	10	201		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	400	%	-				100	100	25,00
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8	Laporan/Dokumen					4	4,00	50,00
						- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan	2	Kelurahan					1	1,00	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2023 s/d TW2	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Dokumen Pengukuran dan Pemetaan - Bidang Tanah	1 Dokumen					1	1,00	100,00
		Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang - Pengadaan Tanah Skala Kecil	1 Dokumen					1	1,00	100,00
		Jumlah Software Informasi Pertanahan yang dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan (berkala)	1 Software/Aplikasi					1	1,00	100,00
		Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami - Kebijakan Pertanahan	500 Orang					0	0,00	0,00
		Jumlah Peserta Penyuluhan yang memahami - Hukum Pertanahan	200 Orang					0	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 Dokumwn				1	1,00	25,00

						Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi - kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi	19	Kelurahan						9	9,00	47,37
						Jumlah Luas Tanah wilayah Administrasi - Kelurahan yang terpetakan	22	Kelurahan						0	0,00	0,00
						Jumlah Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan - Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah	4.000	M						0	0	0
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan - Pertanahan	1	Dokumen						0	0	0

LAMPIRAN

Tabel 2.5 (Form Tabel T-C.30.)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023. TW .II	2023	2024		
1	2	3	4	7	8		8	10		10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar														
A. Bidang Perumahan Rakyat														
I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	100%	100,00%	100,00%		SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M2018
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	0%	100,00%	100,00%		SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M2018
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		%	91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	97,91%	97,91%	98,03%	97,97%		Permendagri 86/2017
4	Persentase Rumah Layak Huni			91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	91,42%	97,91%	91,91%	98,03%		IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
5	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		RENSTRA
6	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah			-	-	50%	-	-	-	30%	50%	-		RENSTRA
7	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			-	-	78,52%	-	-	-	78,31%	78,31%	-		RENSTRA

8	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara					-	-	15%	-	-	-	0%	15%	-	RENSTRA
9	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum(PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani					-	-	39,43%	55,47%	-	-	0%	39,43%	55,47%	PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET	
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023. TW .II	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024			
1	2	3	4	7	8		8	10		10	11	12	13	14	
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar															
B	Bidang Kawasan Permukiman														
10	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Hayang ditangani					-	-	47,74%	-	-	-	35,02%	47,74%	-	IKU DISPERKIMTA
11	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak hunipada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani					-	-	26%	-	-	-	0%	26%	-	IKU DISPERKIMTA
12	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan danPermukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang					-	-	12,5%	-	-	-	0%	12,5%	-	IKU DISPERKIMTA
13	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					-	-	12,5%	-	-	-	0%	12,5%	-	IKU DISPERKIMTA
14	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RumahTidak Layak Huni					-	-	1,57%	-	-	-	0%	1,57%	-	RENSTRA
15	Persentase Berkurangnya Luasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					-	-	15,06%	-	-	-	0%	15,06%	-	RENSTRA
16	Persentase Luasan Permukiman Kumuh DiKawasan Perkotaan		%			-	-	21,05%	24,47%	-	-	17,64%	21,05%	24,47%	Permendagri86/2017
17	Persentase Penanganan Luasan KawasanPermukiman Kumuh					-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%	IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
18	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh(dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani					-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%	PERUBAHAN RENSTRA
19	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan danPermukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani					-	-	5,4%	10,81%	-	-	5,4%	5,4%	10,81%	PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023. TW .II	2023	2024		
1	2	3	4	7	8		8	10		10	11	12	13	14
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
C Bidang Pertanahan														
III Pertanahan														
20	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		IKU - DISPERKIMT A 2023-2026
21	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
22	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	-	-	-	0%	100%	-		RENSTRA
23	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
24	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
25	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
26	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	34,61%	-	-	-	15,38%	34,61%	-		RENSTRA
27	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
28	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	-		RENSTRA
29	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		IKU - DISPERKIMT A 2023-2026
30	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
31	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	100%	-	-	0%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
32	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	-	36,84%	-	-	-	-	36,84%		PERUBAHAN RENSTRA
33	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi			-	-	-	33,33%	-	-	-	-	33,33%		PERUBAHAN RENSTRA

	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data													
34	Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara(IMTN)			-	-	79,77%	84,82%	-		76,39%	79,77%	84,82%		PERUBAHAN RENSTRA
35	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	7%	12%	-		4,99%	7%	12%		PERUBAHAN RENSTRA

LAMPIRAN

Tabel 2.15 (Form Tabel T-C.31.)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.292.049.339					18.292.049.339	
	Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan					6.375.831.944					6.375.831.944	
1	1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.375.831.944	1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.375.831.944		
1	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, 1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87.849.400	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87.849.400		
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen	7.999.000	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen	7.999.000		
	2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.400	2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.400		
	3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.900	3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.998.900		
	4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.400	4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.400		
	5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.200	5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.200		
	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	6) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.001.400	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	6) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	40.001.400		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laporan (LKPI-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)		Jumlah Laporan (LKPI-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	8 Laporan	40.001.400			Jumlah Laporan (LKPI-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	8 Laporan	40.001.400	
7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.850.100	7)	DISPERKIMTA	7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	19.850.100	
	Laporan LAKIP/LKT		- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	5.850.100			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	5.850.100	
	Laporan PMPRB		- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional		- Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Standar Kompetensi Jabatan		- Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Inovasi Daerah		- Jumlah Laporan Inovasi Daeah	1 Laporan	3.500.000			- Jumlah Laporan Inovasi Daeah	1 Laporan	3.500.000	
	Laporan Penyusunan SOP		- Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Laporan				- Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Laporan		
2	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.912.824.983	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.912.824.983	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383	1)	DISPERKIMTA	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	323.938.700	2)	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	323.938.700	
	Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)		Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)					Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan 3) dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.002.000	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.002.000	
	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.999.600	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.999.600	
	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 5) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.500.100	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 5) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.500.100	
	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan 6) tanggapan/tindakan/Rekomendasi Temuan	1 Laporan	5.000.200	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan tanggapan/tindakan/Rekomendasi Temuan	1 Laporan	5.000.200	
	7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0	7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	31.194.100	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	31.194.100	
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.999.000	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.999.000	
	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil 2) Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	19.000.300	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	19.000.300	
		DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	1 Laporan			DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	1 Laporan		
	3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.500	3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.500	
	4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.998.300	4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penatausahaan 4) Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.998.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	250.000.000	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	250.000.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	150.000.000	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	100.000.000	2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	100.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	100%	746.610.880	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	1	746.610.880	
	1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.786.180	1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.786.180	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	2) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	174.458.100	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	174.458.100	
		DISPERKIMTA	Cakupan Peralatan dan - Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	174.458.100		DISPERKIMTA	Cakupan Peralatan dan - Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	174.458.100	
	ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	74.458.100	ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	74.458.100	
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	43.838.600	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	43.838.600	
	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	4) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.717.100	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.717.100	
	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	8.811.000	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	8.811.000	
	6) Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	6) Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	
	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.400	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Dukungan 8) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Dukungan 8) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.999.500	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan 8) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.999.500	
6	Kegiatan Administrasi Barang 6 Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Barang 6 Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0	
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1) Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	0	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa 7 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa 7 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	847.913.743	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	847.913.743	
	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.046.400	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.046.400	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.482.663	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.482.663	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.384.680	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.384.680	
			Cakupan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	575.384.680			Cakupan Penyediaan Jasa - Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	575.384.680	
	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	
	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	1 Paket	100.729.000	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	1 Paket	100.729.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang 8 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang 8 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	499.438.838	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 8 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang 8 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	499.438.838	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.814.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.814.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273.894.612	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	273.894.612	
			Cakupan Kendaraan Dinas * Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	273.894.612			Cakupan Kendaraan Dinas * Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	273.894.612	
	- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	
	- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan 1) Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.340.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan 1) Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.340.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	79 Unit	54.389.826	4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	79 Unit	54.389.826	
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				5.867.409.300					5.867.409.300	
1.	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	100%	415.237.900	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	100%	415.237.900	
	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	60.273.900	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1. Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	60.273.900	
	1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah			1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	0%	0	
	2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan			2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan	0%	0	
	3) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			3) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0%	0	
	4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5)	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah dokumen pendataan 1) Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	60.273.900	5) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah dokumen pendataan 1) Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	60.273.900	
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	354.964.000	2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	354.964.000	
1)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	Jumlah rumah Korban bencana 1) yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	6 Unit	89.915.300	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	Jumlah rumah Korban bencana 1) yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	6 Unit	89.915.300	
2)	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.269.600	2) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.269.600	
4)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	1Unit	154.779.100	4) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun	1Unit	154.779.100	
2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	15%	5.452.171.400	2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	15%	5.452.171.400	
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	100%	5.452.171.400	1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	100%	5.452.171.400	
1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	117.620.400	1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	117.620.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	33 lokasi	5.212.583.200	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	33 lokasi	5.212.583.200	
*	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	100%	0	* Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	# Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	100%	0	
-	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	4.800/16 Paket	0	- Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	- Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	4.800/16 Paket	0	
		Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan - Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	9 Lokasi/paket	0		Kota Singkawang	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan - Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	9 Lokasi/paket	0	
-	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	1.000 M/ 6 Paket	0	- Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Kota Singkawang	- Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	1.000 M/ 6 Paket	0	
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10.011.800	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10.011.800	
4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	111.956.000	4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	111.956.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				2.969.090.170					2.969.090.170	
2.	1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Berkurangnya Luasan 1.1 Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	47,74%	2.398.159.320	1 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	47,74%	2.398.159.320	
			Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25,0%	248.115.100			Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25%	248.115.100	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang 1. Ditingkatkan infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2.398.159.320	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang 1. Ditingkatkan infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2.398.159.320	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	294.395.100	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4 Dokumen	294.395.100	
	2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit	248.115.100	2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit	248.115.100	
	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	96.542.200	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	96.542.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh 1) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0%	0	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh 4) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh 1) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0%	0	
5)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	2 Ha	1.759.106.920	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 5) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	Kota Singkawang	1) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	2 Ha	1.759.106.920	
6)	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Data 1) Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0	0	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 6) Jumlah Dokumen Data 1) Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Data 1) Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0%	0	
2.	2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	2.1 Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	570.930.850	2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	2.1 Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	570.930.850	
			2.2 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,50%	570.930.850			2.2 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,50%	570.930.850	
1.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	570.930.850	1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	570.930.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 1) Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit/KK	570.930.850	1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya 1) Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit/KK	570.930.850	
2)	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)			2) Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)	0%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN												
	BIDANG PERTANAHAN				3.079.717.925					3.079.717.925			
1	1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa 1 Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah 1 Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	59.589.200	
	1)	Sub Kegiatan I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Data Sengketa, Konflik 1) dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	1)	Sub Kegiatan I Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0	
	2)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi 2) Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Berita Acara	59.589.200	2)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Berita Acara	59.589.200	
2	2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian 1 Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian 1 Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	1,00	2.056.916.800	
		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 1 Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah 1 Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	2.056.916.800	
	1)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Keputusan Bupati/Wali 1) Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0	0	1)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0,00	0	
			KOTA SINGKAWANG	- SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota	0	0			KOTA SINGKAWANG	- SK Tim Pengadaan Tanah Kewenangan Kota	0,00	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi	0	0		KOTA SINGKAWANG	SK Tim Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi	0,00	0	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.056.916.800	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.056.916.800	
3	3 PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase inventarisasi Tanah 1 Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan	100%	8.185.900	1 PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase inventarisasi Tanah 1 Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan	100%	8.185.900	
	1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	1 Cakupan Inventarisasi/terdata 1 dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	8.185.900	1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	1 Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	8.185.900	
	1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	8.185.900	1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	8.185.900	
			Jumlah Draft Peraturan - (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen Naskah Akademik	8.185.900			Jumlah Draft Peraturan - (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen Naskah Akademik	8.185.900	
4	4 PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	1) Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	100%	52.667.950	1) PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	1) Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	100%	52.667.950	
	1 Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	KOTA SINGKAWANG	1) Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	100%	75.068.143	1) Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	KOTA SINGKAWANG	1) Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	100%	75.068.143	
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	38.936.825	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	38.936.825	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	13.731.125	1) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	13.731.125	
5	5 PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	34,61%	902.358.075	1 PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	1 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	34,61%	902.358.075	
	1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	1.659.500.000	1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	1.659.500.000	
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	506.867.500	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	506.867.500	
	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1) Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	395.490.575	1) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1) Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	395.490.575	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2023	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			JUMLAH		18.292.049.339			JUMLAH		18.292.049.339	

LAMPIRAN

Tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33.)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1.	04.				URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
					Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan										
1.	04.	01			1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	6.075.831.944	6.075.831.944	6.375.831.944		100%	7.161.999.999
1.	04.	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, 1 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, 1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	67.847.900	67.847.900	87.849.400	APBD	100%	58.000.000
1.	04.	01	2.01	01	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 1) Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	DISPERKIMTA	2 Dokumen	2 Dokumen	7.999.000	7.999.000	7.999.000	APBD	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	8.000.000
1.	04.	01	2.01	02	2) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.400	4.998.400	4.998.400	APBD	1 Dokumen RKA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	03	3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1) Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.998.900	4.998.900	4.998.900	APBD	1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	04	4) Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.001.400	5.001.400	5.001.400	APBD	1 Dokumen DPA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	05	5) Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1) Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.200	5.000.200	5.000.200	APBD	1 Dokumen Perubahan DPA	5.000.000
1.	04.	01	2.01	06	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DISPERKIMTA	5 Laporan	8 Laporan	19.999.900	19.999.900	40.001.400	APBD	5 Laporan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)	Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, MRI, PERJANKIN Induk dan Perubahan, Laporan Peta Proses Bisnis (Probis), Realisasi PERJANKIN Semesteran, Evaluasi Renja Triwulan)		5 Laporan	8 Laporan	19.999.900	19.999.900	40.001.400	APBD		5 Laporan	20.000.000
1.	04. 01 2.01 07	7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Laporan	6 Laporan	19.850.100	19.850.100	19.850.100	APBD	5 Laporan	10.000.000
		- Laporan LAKIP/LKT	- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	5.850.100	5.850.100	5.850.100	APBD	1 Laporan	2.000.000
		- Laporan PMPRB	- Jumlah Laporan PMPRB	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	1 Laporan	2.000.000
		- Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	- Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	1 Laporan	2.000.000
		- Laporan Standar Kompetensi Jabatan	- Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	1 Laporan	2.000.000
		- Laporan Inovasi Daerah	- Jumlah Laporan Inovasi Daeah	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	1 Laporan	2.000.000
		- Laporan Penyusunan SOP	- Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP)	DISPERKIMTA		1 Laporan			3.500.000	APBD	-	-
1.	04. 01 2.02	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	3.932.826.483	3.932.826.483	3.912.824.983		100%	4.491.684.703
1.	04. 01 2.02 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	36 Orang/12 Bulan	36 Orang/12 Bulan	3.561.384.383	3.561.384.383	3.561.384.383	APBD	36 Orang/12 Bulan	4.099.197.459
1.	04. 01 2.02 02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	12 Dokumen	12 Dokumen	323.938.700	323.938.700	323.938.700	APBD	1 Dokumen	344.987.244
		Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan - Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)		100%	100%	323.938.700	323.938.700	323.938.700	APBD	1 Dokumen	344.987.244
1.	04. 01 2.02 03	3) Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	6.002.000	6.002.000	6.002.000	APBD	1 Dokumen	6.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana										
1.	04.	01	2.02	04	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.999.600	5.999.600	5.999.600	APBD	1 Dokumen	6.000.000
1.	04.	01	2.02	05	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1) Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.100	10.500.100	10.500.100	APBD	1 Laporan	10.500.000
1.	04.	01	2.02	06	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan 1) tanggapan/tindaklanjut Rekomendasi Temuan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	5.000.200	5.000.200	5.000.200	APBD	1 Laporan	5.000.000
1.	04.	01	2.02	07	7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1)	DISPERKIMTA	4 Laporan	0	20.001.500	20.001.500	0	APBD	2 Laporan	20.000.000
1.	04.	01	2.03		3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	31.194.100	31.194.100	31.194.100		100%	15.700.000
1.	04.	01	2.03	01	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana 1) Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.000	3.999.000	3.999.000	APBD	1 Dokumen	4.000.000
1.	04.	01	2.03	03	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1)	DISPERKIMTA	2 Laporan	2 Laporan	19.000.300	19.000.300	19.000.300	APBD	1 Laporan	3.500.000
						Jumlah Laporan Penilaian dan laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD 2)	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	3.500.000
1.	04.	01	2.03	05	3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.196.500	4.196.500	4.196.500	APBD	12 Laporan	4.200.000
1.	04.	01	2.03	06	4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.998.300	3.998.300	3.998.300	APBD	1 Laporan	4.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1.	04.	01	2.05		4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi 4 Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	0	250.000.000		100%	285.000.000	
1.	04.	01	2.05	02	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian 1) Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISPERKIMTA			0	150.000.000	APBD		175.000.000	
1.	04.	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan 2) Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan 2) Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISPERKIMTA			0	100.000.000	APBD	56 Orang	110.000.000	
1.	04.	01	2.06		5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum	DISPERKIMTA	100%	100%	696.610.880	696.610.880	746.610.880	100%	711.570.830	
1.	04.	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen 1) instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	28.786.180	28.786.180	28.786.180	APBD	1 Paket 30.226.691	
1.	04.	01	2.06	02	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DISPERKIMTA	2 Paket	2 Paket	174.458.100	174.458.100	174.458.100	APBD	2 Paket 183.158.981	
						Cakupan Peralatan dan # Perlengkapan Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	100%	100%	174.458.100	174.458.100	174.458.100	APBD	100% 183.158.981	
					- ATK Perkantoran	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	74.458.100	74.458.100	74.458.100	APBD	1 Paket 78.158.981	
					- Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket (60 Unit)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	1 Paket 105.000.000	
1.	04.	01	2.06	03	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	43.838.600	43.838.600	43.838.600	APBD	1 Paket 46.030.698	
1.	04.	01	2.06	05	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	32.717.100	32.717.100	32.717.100	APBD	1 Paket 34.353.459	
1.	04.	01	2.06	06	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1) dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	8.811.000	8.811.000	8.811.000	APBD	1 Dokumen 9.801.000	
1.	04.	01	2.06	09	6) Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	450.000.000	APBD	12 Laporan 400.000.000	
1.	04.	01	2.06	10	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.400	4.000.400	4.000.400	APBD	1 Dokumen 4.000.000	
1.	04.	01	2.06	11	8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan 1) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.500	3.999.500	3.999.500	APBD	1 Dokumen 4.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	04.	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa 7 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	847.913.743	847.913.743	847.913.743			1 Paket	841.748.645
1.	04.	01	2.08	01	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.046.400	4.046.400	4.046.400	APBD		12 Laporan	4.253.004
1.	04.	01	2.08	02	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	268.482.663	268.482.663	268.482.663	APBD		12 Laporan	281.906.576
1.	04.	01	2.08	04	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1) Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	575.384.680	575.384.680	575.384.680	APBD		12 Laporan	555.589.065
						Cakupan Penyediaan Jasa # Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		100%	100%	575.384.680	575.384.680	575.384.680	APBD		100%	555.589.065
					PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	DISPERKIMTA	16 Orang/12 Bulan	15 Orang/12 Bulan	474.655.680	474.655.680	474.655.680	APBD		16 Orang/12 Bulan	474.522.240
					- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Jumlah Paket Makanan dan - Minuman Tamu/Rapat yang disediakan selama 12 Bulan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	100.729.000	100.729.000	100.729.000	APBD		1 Paket/12 Bulan	81.066.825

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	04.	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	499.438.838	499.438.838	499.438.838	APBD		1 Paket	758.295.822
1.	04.	01	2.09	01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISPERKIMTA	1 Unit	1 Unit	61.814.400	61.814.400	61.814.400	APBD		1 Unit	50.000.000
1.	04.	01	2.09	02	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISPERKIMTA	4 Unit	4 Unit	273.894.612	273.894.612	273.894.612	APBD		4 Unit	287.587.125

						Cakupan Kendaraan Dinas * Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100%	100%	273.894.612	273.894.612	273.894.612	APBD		100%	287.587.125
						- Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	4 unit /12 Bulan (48 Kali)	261.594.612	261.594.612	261.594.612	APBD		4 unit /12 Bulan (48 Kali)	282.074.625
						- Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	4 unit (Kendaraan Roda Empat)	12.300.000	12.300.000	12.300.000	APBD		4 unit (KendaraanRoda Empat)	5.512.500
1.	04.	01	2.09	09		3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan 1) Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISPERKIMTA	1 Unit	1 Unit	109.340.000	109.340.000	109.340.000	APBD	1 Unit	363.599.197
1.	04.	01	2.09	10		4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	DISPERKIMTA	80 Unit	79 Unit	54.389.826	54.389.826	54.389.826	APBD	80 Unit	57.109.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Target Capain		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	04.					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				5.867.409.300	5.867.409.300	5.867.409.300				9.595.400.000
1.	04.	02				1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang di tangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	415.237.900	415.237.900	415.237.900	APBD	100%	648.000.000
							1.2 Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	KOTA SINGKAWANG	50%	50%	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD	0%	0
1.	04.	02	2.01			1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD	0	0
1.	04.	02	2.01	01		1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0
1.	04.	02	2.01	02		2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1) Jumlah dokumen pendataan Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi relokasi Perumahan	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD		0

1.	04.	02	2.01	04	3) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	KOTA SINGKAWANG		0	0	0	APBD		0
				05	4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau	KOTA SINGKAWANG		0	0	0	APBD		0
1.	04.	02	2.01	06	5) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	60.273.900	60.273.900	60.273.900	APBD	0

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			13
1.	04.	02	2.03	2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	354.964.000	354.964.000	354.964.000	APBD	100%	628.000.000
1.	04.	02	2.03	01	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah Korban bencana yang direhab (rehabilitasi/renovasi)	KOTA SINGKAWANG	6 Unit	6 Unit	89.915.300	89.915.300	89.915.300	APBD	6 Unit Rumah	210.000.000
1.	04.	02	2.03	02	2) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	110.269.600	110.269.600	110.269.600	APBD	1 Dokumen	110.000.000
1.	04.	02	2.03	05	3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	1Unit	1Unit	154.779.100	154.779.100	154.779.100	APBD	3 Unit	308.000.000
1.	04.	02	2.06	3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan	KOTA SINGKAWANG							100%	20.000.000
1	04	02	2.06	03	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	KOTA SINGKAWANG							1 Laporan	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.04	2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.2 Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	15%		5.452.171.400	5.452.171.400	5.452.171.400			55,47%	8.947.400.000
1.04.04.2.01	1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun	KOTA SINGKAWANG	100%		5.452.171.400	5.452.171.400	5.452.171.400	APBD		100%	8.947.400.000
1.04.04.2.01.01	1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	117.620.400	117.620.400	117.620.400	APBD		1 Dokumen	132.000.000
	Inventarisasi /Pendataan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan PSU Perumahan (1 Dokumen), Jumlah - Dokumen Update Pendataan Perumahan dan Backlog Perumahan (1 Dokumen)	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	117.620.400	117.620.400	117.620.400	APBD			
1.04.04.2.01.02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	33 lokasi	33 lokasi	5.212.583.200	5.212.583.200	5.212.583.200	APBD		20 Lokasi/Paket	8.470.000.000
	Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU * lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang terfasilitasi PSU	KOTA SINGKAWANG	100%					APBD		100%	8.470.000.000
	Pembangunan/Peningkatan * Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	# Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	4.800/16 Paket					APBD		35 Lokasi/Paket	8.470.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Jalan Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	Kota Singkawang	9 Lokasi/paket					APBD			4.308.349.649
	Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan -Saluran Drainase Lingkungan (perumahan pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan (Perumahan pengembang) yang ditingkatkan/dipelihara	Kota Singkawang	600 M'/3 paket					APBD			4.161.650.351
1.	04. 04 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka 3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	10.011.800	10.011.800	10.011.800	APBD		1 Laporan	22.000.000
1.	04. 04 2.01 05	Sub Kegiatan Verifikasi dan 4) Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	111.956.000	111.956.000	111.956.000	APBD		1 Laporan	323.400.000
1.	04.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					2.969.090.170	2.969.090.170	2.969.090.170				15.157.924.086
1	04 03	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	47,74%	47,74%	2.590.300.345	2.398.159.320	2.398.159.320			65,14%	3.907.924.086
		1.2 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha		25%	25%	440.256.125	248.115.100	248.115.100			50%	1.500.000.000

1	04	03	2.03	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Peremukimannya	Kota Singkawang	2 Ha	2 Ha	2.590.300.345	2.398.159.320	2.398.159.320	APBD	2 Ha	3.907.924.086
1	04	03	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) danDetail 1) Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	4 Dokumen	4 Dokumen	294.395.100	294.395.100	294.395.100	APBD	3 Dokumen	300.000.000
1	04	03	2.03	02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Singkawang	8 Unit	8 Unit	440.256.125	248.115.100	248.115.100	DAU	12 Unit	450.000.000
1	04	03	2.03	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 3) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1 Laporan	1 Laporan	96.542.200	96.542.200	96.542.200	APBD	1 Laporan	100.000.000
1	04	03	2.03	05	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa 1) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang			0	0	0	APBD	1 Laporan	150.000.000
1	04	03	2.03	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan 5) Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan	Kota Singkawang	2 Ha	2 Ha	1.759.106.920	1.759.106.920	1.759.106.920	APBD	2 Ha	1.807.924.086
1	04	03	2.03	08	6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi	Kota Singkawang								1.050.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	04	03	2.03	07	Sub Kegiatan Pendataan dan 7) Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data 1) Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Singkawang			0	0	0	APBD	1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	04	04	2.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	KOTA SINGKAWANG	12,50%	12,50%	378.789.825	570.930.850	570.930.850			25%	11.250.000.000	
					2.2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha		12,50%	12,50%	378.789.825	570.930.850	570.930.850			25%	11.250.000.000	
1	04	04	2.03	1.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	5 Ha	5 Ha	378.789.825	570.930.850	570.930.850	APBD		5 Ha	11.250.000.000
1	04	04	2.01	01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Singkawang	25 Unit/KK	25 Unit/KK	378.789.825	570.930.850	570.930.850	APBD		27 Unit	11.100.000.000
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni # MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK+DAU)	Kota Singkawang	25 Unit/KK					DAK + DAU			
							Jumlah Fasilitas/Monitoring dan BOP Rumah MBR yang - mendapatkan bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni	Kota Singkawang	1	Dokumen/kegiatan				DAU			
							Jumlah Rumah MBR yang - mendapatkan bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (DAU)	Kota Singkawang	8 Unit / KK					DAU			
1	04	04	2.01	03	2) Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	1)	Jumlah Dokumen Data penerima bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Kota Singkawang									150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	10.											
2	10	04										
2	10	04	2.01									
2	10	04	2.01	01								
2	10	04	2.01	02								
2	10	05										
2	10	05	2.01									
2	10	05	2.01	01								
2	10	05	2.01	02								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	07										
2	10	07	2.01									
2	10	07	2.01	01								
2	10	08										
2	10	08	2.01									
2	10	08	2.01	01								
2	10	08	2.02									
2	10	08	2.02	02								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	10	09	7	PENGLOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	32.667.950	32.667.950	52.667.950	APBD	100%	451.380.000	
2	10	09	2.01	1	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	32.667.950	32.667.950	52.667.950	APBD	100%	451.380.000
2	10	09	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	18.936.825	18.936.825	38.936.825	APBD	1 Dokumen	215.000.000
2	10	09	2.01	02	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1)	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	13.731.125	13.731.125	13.731.125	APBD	1 Dokumen	236.380.000
2	10	10	8	PENATAGUNAAN TANAH	1	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	KOTA SINGKAWANG	34,61%	34,61%	902.358.075	902.358.075	902.358.075		12%	1.530.000.000	
2	10	10	2.01	1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	902.358.075	902.358.075	902.358.075	APBD	100%	1.530.000.000
2	10	10	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	506.867.500	506.867.500	506.867.500	APBD	5 laporan/ Dokumen	105.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	10	10	2.01	02	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan 1) Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	395.490.575	395.490.575	395.490.575	APBD	5 Dokumen	1.350.000.000
2	10	10	2.01	03	3) Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 1) Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG			0	0	0	APBD	1 Dokumen	75.000.000
					J U M L A H					16.519.049.339	16.519.049.339	18.292.049.339			38.539.704.085

Singkawang, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199703 1 006